

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Sektor Pertanian dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani di Provinsi Lampung.

Oleh : Andi Surya

(Alumni Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Borobudur)

ABSTRACT

The background of this research is low optimalization of Agriculture Factors resources used in Lampung Province, impacted to low contribution of Agriculture Employee sector and Farmer's welfare.

The objective of this research is to describe the relationship between independent variables, and contribution effect of factors to have influence agriculture development sector, and the implication to farmer's welfare in Lampung Province. From this research, it is hoped to contribute to Agriculture Development Sector and increasing return to farmer's welfare in Lampung Province.

This research uses a comprehensive descriptive method and verificative method. It begins with data collecting, tabulation, analysis, hypotesis test, problem solving, result and recomendation. The sampling technic is Purposive Random Sampling with 270 farmers as respondence.

The results showed that the land, infrastructure, technology, human resources, energy, agriculture production input, capital, institution and policy are 75.20 % to have influence on agriculture economic sector development and the other side, the agriculture economic development sector is 84,70 % to have influence on the farmer's welfare in Lampung Province.

To Increasing the Agriculture Development Sector, it is suggested that optimaliztion uses of land, infrastructure, technology, human resources, energy, agriculture production input, capital, institution and policy for farmer's welfare.

Key words : land, infrastructure, technology, human resources, energy, agriculture production input, capital, institution and policy, agriculture development sector, and farmer's welfare.

PENDAHULUAN

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP II) tahun 2005-2025, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007, Pembangunan perekonomian nasional di arahkan pada transformasi perekonomian dari perekonomian berbasis keunggulan komperatif menjadi perekonomian keunggulan kompetitif. Terutama pembangunan sektor pertanian yang mengubah dari konsep pembangunan konvensional ke arah keunggulan kompetitif yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama kesejahteraan petani itu sendiri.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi nasional abad ke-21, masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis yang berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, yaitu kegiatan agribisnis (termasuk agroindustri) akan menjadi salah satu kegiatan unggulan (*a leading sector*) pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas (Saragih, 2010, h. 21).

Pada RPJP II tahun 2005 – 2025 posisi antara usahatani dan non-usahatani seimbang, yaitu 50 persen kegiatan usahatani dan 50 persen kegiatan

agribisnis non-usahatani. Pada tahap RPJP II kegiatannya memproduksi untuk dapat dijual, yaitu produksinya menyesuaikan dengan permintaan industri dan agroindustri.

Dalam RPJP-II, telah dikembangkan strategi dan kebijaksanaan yang menempatkan agribisnis sebagai salah satu sektor unggulan. Sumber-sumber pertumbuhan yang cukup potensial perlu dimanfaatkan untuk memacu tingkat pertumbuhan sesuai dengan sasaran ekonomi. Peningkatan pertumbuhan sekaligus juga memperbaiki berbagai kesenjangan dalam tingkat kesejahteraan antar golongan dan antar daerah apabila sasarannya adalah sebagian besar penduduk berpendapatan rendah atau miskin yang terutama terkonsentrasi di sektor pertanian dan pedesaan. Strategi pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung meliputi aspek-aspek lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kebijakan dan perundang-undangan.

Besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimilikinya, salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya fisik (*physical resources*) atau kekayaan alam (berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya). Masalah tanah atau lahan yang menonjol di Indonesia adalah perpecahan (*division*),

perpencaran (*fragmentation*) dan bentuk milik tanah (*tenancy*). Perpecahan tanah adalah pembagian milik seseorang atas petak-petak kecil untuk diberikan kepada ahli warisnya. Perpencaran tanah adalah sebuah usaha tani dibawah satu manajemen yang terdiri dari beberapa petak yang berserak-serak. Bentuk-bentuk usaha tani yang demikian menyulitkan sistem pengairan dan pengawasannya. Diperlukan waktu dan biaya yang lebih banyak

sehingga efisiensi produksi menurun. Semakin luas lahan pertanian di suatu provinsi maka semakin sedikit rumah tangga yang menguasainya. Lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian terdiri dari lahan sawah dan bukan lahan sawah. Pada periode tahun 1973 – 2003 luas lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian Provinsi Lampung mengalami peningkatan yaitu dari 673 ribu hektar menjadi 1.198 ribu hektar (lihat Tabel 1.1).

Tabel 1. Luas Lahan Provinsi Lampung menurut Penggunaan dan Kabupaten / Kota, 2009 (Ha)

Kabupaten / Kota	Sawah	Pekara- ngan	Tegal/ Kebun/ Ladang/ Huma	Lain- nya	Jumlah
1. Kab. Lampung Barat	19.893	10.135	48.903	416.109	495.040
2. Kab. Tanggamus	31.636	20.225	58.550	225.250	335.661
3. Kab. Lampung Selatan	44.847	18.104	82.811	54.939	200.701
4. Kab. Lampung Timur	58.969	28.548	91.599	254.673	433.789
5. Kab.Lampung Tengah	72.692	42.839	129.109	234.342	478.982
6. Kab.Lampung Utara	17.291	36.289	97.627	121.356	272.563
7. Kab.Way Kanan	18.329	26.669	104.792	242.373	392.163
8. Kab.Tulang Bawang	166.564	39.071	144.475	426.874	777.084
9. Kab.Pesawaran	13.121	7.364	30.382	66.510	117.377
10.Kota Bandar Lampung	1.024	8.611	2.912	5.749	19.296
11.Kota Metro	3.013	1.531	202	1.433	6.179
Jumlah	447.379	239.386	791.362	1.966.187	3.528.835

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Lahan sawah di Indonesia hanya 4,5% dari total luasan daratan. Sekitar 8,5% merupakan tanah perkebunan, 7,8% lahan kering, 13% dalam bentuk rumah, tegalan, dan ilalang, serta 63% merupakan kawasan hutan. Keterbatasan lahan pertanian, khususnya untuk komoditas-komoditas pangan, sudah merupakan salah satu persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia selama ini. Menurut Herman Siregar dalam Tambunan (2009, h. 152), lahan sawah terancam semakin cepat berkurang walaupun sebenarnya lahan yang secara potensial dapat digunakan, misalnya, tetapi belum digunakan masih banyak. Alasannya, pencetakan sawah baru menemui banyak kendala, termasuk biayanya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun tidak signifikan ketimbang luas areal yang terkonversi untuk keperluan non pertanian. Ironisnya, laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan) dan industrialisasi.

Konversi lahan sawah ke nonsawah banyak terjadi di wilayah-wilayah yang sentra-sentra produksi pangan. Umumnya lahan sawah yang

dikonversi tidak hanya sangat subur, tetapi lokasinya juga strategis, berdekatan dengan jalan raya atau jalan tol. Sebagai contoh kasus, menurut BPN dalam Tambunan (2009, h. 152), pada tahun 2004 luas lahan sawah 8,9 juta ha : 7,31 juta ha beririgasi dan 1,45 juta ha nonirigasi. Dari sawah irigasi yang subur, 3,099 juta ha hendak dikonversi oleh pemerintah daerah. Dari jumlah itu, 1,67 juta ha (53,8%) merupakan sawah beririgasi di Jawa dan Bali. (Khudori dalam Tambunan, 2009, h. 152). Padahal, berdasarkan Keputusan Presiden No. 30 Tahun 1990, lahan pertanian dengan irigasi teknis dilarang dialihkan menjadi lahan nonpertanian (Pribadi, dkk dalam Tambunan, 2009, h. 152). Menurut perhitungan, konversi tersebut bisa membuat 14,26 juta GKG atau 10 juta ton beras berpotensi hilang. Selama ini sekitar 56% - 60% produksi padi bertumpu pada sawah-sawah yang subur di Jawa (Kompas 9 April 2007). Konversi lahan sawah secara besar-besaran ini sebagian telah disetujui oleh DPRD setempat dalam bentuk peraturan daerah. Hingga saat ini konversi lahan yang direncanakan itu terus dilakukan. Lahan seluas itu yang rata-rata berkualitas baik akan digunakan untuk pembangunan pusat perbelanjaan, pusat

perkantoran, industri, infrastruktur jalan, real estat, hingga bisnis lahan kuburan.

Sebagian besar kecilnya potensi pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya yang dimilikinya, salah satu sumber daya tersebut adalah sumber daya fisik (*physical resources*) atau kekayaan alam (berupa tanah yang subur, kandungan mineral berharga dan bahan mentah bernilai ekonomis lainnya). Masalah tanah atau lahan yang menonjol di Indonesia adalah perpecahan (*division*), perpecahan (*fragmentation*) dan bentuk milik tanah (*tenancy*). Perpecahan tanah adalah pembagian milik seseorang atas petak-petak kecil untuk diberikan kepada ahli warisnya. Perpecahan tanah adalah sebuah usaha tani dibawah satu manajemen yang terdiri dari beberapa petak yang berserak-serak. Bentuk-bentuk usaha tani yang demikian menyulitkan sistem pengairan dan pengawasannya. Diperlukan waktu dan biaya yang lebih banyak sehingga efisiensi produksi menurun. Semakin luas lahan pertanian di suatu provinsi maka semakin sedikit rumah tangga yang menguasainya.

Namun demikian sebagian lahan pertanian tersebut, sangat di sayangkan bahwa kepemilikannya tidak dimiliki oleh petani melainkan dimiliki oleh masyarakat yang memiliki uang, masyarakat kota, dan sebagian milik pengusaha, sedangkan petani hanya sebagai penggarap saja. Walaupun petani memiliki lahan pertanian tetapi mereka hanya memiliki lahan yang sangat terbatas, dan sebagian mereka tidak bersertifikat. Dengan demikian bagi petani penggarap dan petani yang memiliki lahan

terbatas, maka kerja keras dari petani tersebut tidak akan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Melainkan hasil kerja kerasnya hanya mampu dalam mempertahankan untuk kelangsungan hidupnya saja.

Pembangunan sistem dan usaha pertanian yang mendayagunakan keragaman sumber daya alam tidak akan *sustainable* bila keanekaragaman sumber daya alam tidak dilestarikan. Oleh karena itu upaya pelestarian sumber daya alam perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sistem dan usaha pertanian. Dalam pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan perlindungan pada lahan pertanian yang menyangkut masalah tanggung jawab pelestarian (*property right*). Selama ini banyak sumber daya alam seperti hutan tidak jelas pemiliknya, yang ada hanyalah milik negara. Sistem penguasaan milik negara atau milik umum tidak kondusif bagi pelestarian SDA karena terjebak pada apa yang disebut sebagai *tragedy of common* (semua pihak merasa berhak memanfaatkan namun tak seorang pun yang bersedia untuk melestarikannya). Oleh karena itu, bagi SDA yang masih demikian perlu diperjelas pemiliknya sehingga ada yang bertanggung jawab dalam pelestariannya.

Adapun produktivitas pekerja di Provinsi Lampung menurut komoditas pada tahun 2006 – 2009 memperlihatkan tidak adanya peningkatan yang signifikan, malahan terdapat penurunan, untuk lebih jelasnya mengenai produktivitas pekerja di Provinsi Lampung menurut komoditas pada tahun 2006 – 2009 dapat disajikan pada Tabel 1.2. di bawah ini :

Tabel 2. Produktivitas Pekerja Menurut Komoditas di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2008 (Juta Rupiah per Pekerja)

Tahun	Komoditas	
	Dengan Migas	Tanpa Migas
2006	10,07	9,91
2007	9,96	9,82
2008	10,39	10,25
2009	10,26	10,21

Sumber : Laporan Perekonomian BPS Indonesia 2008, BPS 2009.

Berdasarkan Tabel 1.2 tersebut di atas, memperlihatkan bahwa penurunan produktivitas dikarenakan lemahnya penguasaan teknologi. Dalam rangka mengembangkan sektor pertanian maka penggunaan teknologi modern merupakan kebutuhan yang mendesak. Penggunaan teknologi

pertanian yang masih sangat terbatas dan sederhana dapat menghambat pembangunan sektor pertanian. Dalam menghadapi tantangan-tantangan di masa yang akan datang, diperlukan pengembangan teknologi dengan aspek-aspek bioteknologi, teknologi ekofarming, teknologi proses, teknologi

produk dan teknologi informasi. Disamping pengembangan teknologi tersebut diperlukan pula pengembangan sumber daya manusia (SDM) pertanian untuk memampukan sektor pertanian secara keseluruhan. Kemampuan SDM pertanian yang masih tergolong rendah memerlukan sistem

Perkembangan kondisi ekonomi menunjukkan semakin terkaitnya kegiatan sektor pertanian dengan sektor-sektor lain. Oleh karena itu, penanganan kegiatan pertanian dengan serta kegiatan-kegiatan lain yang terkait sebagai suatu sistem agribisnis merupakan tuntutan yang semakin tidak dapat dihindari.

Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Bruto (PDB) yang terus

pembinaan dan pengembangan SDM yang mampu meningkatkan wawasan mikro-makro-global (*micro-macro-global behavior*) dari sumber daya manusia tersebut sehingga dapat mendukung pembangunan sektor pertanian.

menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional.

Perubahan struktur ekonomi di Indonesia selama periode 1990-an pangsa PDB dari pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) mengalami penurunan (atas harga konstan 1993) dari sekitar 17,9 persen tahun 1993 menjadi 19,6 persen tahun 1999, sedangkan PDB dari industri manufaktur selama kurun waktu yang sama meningkat dari 22,3 persen menjadi 26,0 persen. Dari tahun 2000 hingga tahun 2006, pangsa PDB dari pertanian lebih rendah lagi, sekitar 15 persen, sedangkan dari industri naik ke sekitar 27 persen hingga 28 persen. Sedangkan atas harga berlaku, pangsa PDB dari pertanian menurun dari 19,4 persen pada awal periode 1990-an menjadi 13,6 persen pada tahun 2006 dan pada 2009 tercatat sebesar 15,3 persen (lihat Tabel 1.3.).

Tabel 3. Distribusi PDB menurut Tiga Sektor Besar 1968-2009 (dalam persen)

Sektor	1988	1990	1995	2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Pertanian	24,1	19,4	17,1	15,6	15,5	15,2	14,3	13,1	13,6	13,7	14,5	15,3
Industri	18,5	39,1	41,8	45,9	44,5	43,7	44,6	46,8	47,0	27,1	27,9	26,4
Jasa-jasa	45,2	41,5	41,1	38,5	40,1	41,1	41,0	40,2	40,1	59,2	57,6	58,3

Keterangan : 1) atas harga yang berlaku; 2) termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan; 3) lainnya terdiri atas sektor listrik, gas dan air minum, konstruksi, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintah dan jasa-jasa.

Sumber : *Asian Development Bank* (ADB) database dalam Tambunan (2009,h.144) dan BPS, 2012

Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti bahwa volume produksi di sektor tersebut berkurang (pertumbuhan negatif) selama periode tersebut, tetapi laju pertumbuhan output-nya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output sektor-sektor lain. Pada Tabel 1.3. dapat dilihat bahwa selama periode 2001 – 2004, output pertanian tumbuh sekitar 3% hingga 4%, sedangkan industri antara 3%

- 6%. Data BPS tahun 2005 menunjukkan bahwa selama tahun tersebut, output pertanian hanya sebesar 2,72%, sementara output industri sebesar 4,6%. Sedangkan untuk triwulan III – 2010, pertumbuhan output pertanian tercatat hanya 2,6%. Adapun data pertumbuhan PDB menurut Sektor di Indonesia 2001 – 2010 (triwulan III) (%) dapat dilihat pada Tabel 1.4. sebagai berikut :

Tabel 4. PDB Menurut Sektor di Indonesia 2001–2010 (dalam persen)

Sektor	Periode									
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pertanian*	3,1	3,2	4,3	4,1	2,72	3,36	3,43	4,77	4,13	2,6
Pertambangan & Penggalian	0,3	1,0	-0,9	-4,6	3,2	1,7	2,02	0,51	4,37	3,31
Industri Manufaktur	3,3	5,3	5,3	6,2	4,6	4,59	4,67	3,66	2,11	4,05
Listrik, Gas & Air Bersih	7,9	8,9	5,9	5,9	6,3	5,76	10,3	10,92	13,7	8
Bangunan	4,6	5,5	6,7	8,2	7,54	8,34	8,61	7,31	7,05	6,79
Perdagangan, Hotel & Restoran	4,4	3,9	5,3	5,8	8,3	6,42	8,41	7,23	1,14	9,26
Transportasi & Komunikasi	8,1	8,4	11,6	12,7	2,7	14,2	14,0	16,69	15,5	12,76
Keuangan, Sewa & Jasa	6,6	6,4	7,0	7,7	6,7	5,47	7,99	8,24	3	5,89
Jasa-Jasa Lainnya	3,2	3,8	3,9	4,9	5,16	6,16	6,6	6,45	5,05	5,45
PDB	3,8	4,4	4,9	5,1	5,69	5,5	6,28	6,06	6,4	5,9
PDB tanpa Minyak & Gas	5,1	5,1	5,8	6,2	6,57	6,11	6,87	6,52	4,55	6,34
									4,93	

Keterangan: Tahun 2010 (triwulan III, *) termasuk perikanan, perkebunan, kehutanan dan peternakan

Sumber : Data BPS 2010)

Selama pelaksanaan PJP-I (1969 – 1994), perekonomian Indonesia mampu bertumbuh rata-rata 7,2 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi selama PJP-I telah dimungkinkan oleh tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (melebihi 10 persen per tahun) pada sektor-sektor nonpertanian secara khusus, industri pengolahan dan jasa-jasa (perdagangan, keuangan dan perbankan, konstruksi dan sebagainya). Tingkat pertumbuhan pada sektor pertanian (termasuk kehutanan) dan pertambangan hanya sekitar 3 sampai 4 persen per tahun. Dengan perkembangan itu, memang telah tercapai struktur perekonomian yang semakin seimbang. Sumbangan sektor pertanian dalam PDB telah turun menjadi 18,46 persen pada akhir PJP-I, sedangkan sumbangan sektor industri meningkat menjadi 22,33 persen (Saragih, 2010, h. 2).

Memasuki era tahap II (PJP II) atau era industrialisasi, yang secara formal meliputi periode 1994 – 2018. Secara umum, terdapat 3 (tiga) jalur pilihan industrialisasi yang memiliki potensi untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jalur pertama, mengandalkan pada industri yang berbasis luas. Jalur kedua, mencoba mengandalkan industri dan kegiatan-kegiatan strategis yang memanfaatkan

teknologi canggih dan rumit serta bernilai tambah tinggi. Sedangkan jalur ketiga, yaitu dengan dua jalur terdahulu, belum ada jaminan bahwa industrialisasi akan didukung oleh pertanian yang tangguh. Industrialisasi tanpa membenahi sektor pertanian terlebih dahulu, atau transformasi ekonomi yang tidak seimbang, pada gilirannya akan menyebabkan sektor pertanian itu menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dapat tersendat atau walaupun pertumbuhan dapat dipacu lebih tinggi, kesenjangan akan semakin melebar serta menimbulkan dampak negatif lain yang cukup serius. Selama PJP II ini, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai rata-rata 7,0 persen per tahun dengan tingkat pendapatan per kapita mencapai US\$ 2.600 (Saragih, 2010, h. 24). Pertumbuhan ekonomi seperti itu merupakan prestasi yang membanggakan (*respectable*). Apabila pertumbuhan ekonomi ini dapat dipertahankan selama PJP II maka tentu merupakan prestasi yang luar biasa. Hal ini karena semakin tinggi pendapatan per kapita semakin sulit mendapatkan pertumbuhan yang lebih besar.

Mengakhiri PJP II, pembangunan nasional masih berhadapan dengan berbagai konfigurasi ketimpangan pembangunan dan pendapatan. Cara

yang paling efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan penduduk adalah mengembangkan kegiatan ekonomi dimana sebagian besar penduduk menggantungkan kehidupan ekonominya. Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam

perekonomian nasional. Data perbandingan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.5. berikut :

Tabel 5. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia 2004 – 2009 (%)

Tahun	Lampung	Indonesia
2004	5,07	5,03
2005	4,02	5,69
2006	4,98	5,50
2007	5,94	6,28
2008	5,26	6,06
2009	5,07	4,65

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Data perbandingan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Lampung dengan

laju pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.6. berikut :

Tabel 6. Perbandingan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2009 (%)

Tahun	Lampung	Indonesia
2004	5,76	5,97
2005	4,61	6,57
2006	5,31	6,11
2007	6,14	6,87
2008	5,33	6,52
2009	5,33	5,21

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Data perbandingan laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan PDB Indonesia

Tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.7. berikut :

Tabel 7. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 (%)

Tahun	Lampung	Indonesia
2004	3,57	3,79
2005	3,67	4,73
2006	3,51	4,13
2007	4,47	4,91
2008	3,82	4,73

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Data perbandingan laju pertumbuhan PDRB per kapita tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Lampung dengan laju

pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.8. berikut :

Tabel 8. Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita Tanpa Minyak dan Gas Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2004 – 2008 (%)

Tahun	Lampung	Indonesia
2004	4,25	4,71
2005	4,26	5,60
2006	3,83	4,74
2007	4,66	5,50
2008	3,89	5,18

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Berdasarkan data tersebut di atas, maka perbandingan laju pertumbuhan PDRB per kapita tanpa minyak dan gas atas dasar harga konstan 2000 Provinsi Lampung Tahun 2004 – 2008 memperlihatkan penurunan dari tahun - ketahun, sehingga mengakibatkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian semakin berkurang.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dengan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel 1.9. berikut :

Tabel 9. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2004 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	37,64	14,34
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,68	8,94
3.	Industri Pengolahan	12,48	28,07
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,74	1,03
5.	Konstruksi	5,32	6,59
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,59	16,05
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,22	6,20
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,04	8,47
9.	Jasa-Jasa	11,28	10,32

Sumber : BPS Provinsi Lampung (2010)

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dengan distribusi

persentase PDB Indonesia Tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel 1.10. berikut :

Tabel 10. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2005 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	37,01	13,13
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,99	11,14
3.	Industri Pengolahan	12,86	27,41
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,71	0,96
5.	Konstruksi	4,82	7,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,03	15,56
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,75	6,51
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,71	8,31
9.	Jasa-Jasa	11,12	9,96

Sumber : BPS (2010)

Berdasarkan Tabel 1.10. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dengan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.11. berikut :

Tabel 11. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2006 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	36,98	12,97
2.	Pertambangan dan Penggalian	4,38	10,98
3.	Industri Pengolahan	12,51	27,54
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,73	0,91
5.	Konstruksi	5,40	7,52
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,42	15,02
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	7,76	6,93
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,04	8,06
9.	Jasa-Jasa	10,77	10,07

Sumber : BPS (2009, h.91)

Berdasarkan Tabel 11. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi

persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka

kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan

usaha Provinsi Lampung dengan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 1.12. berikut :

Tabel 12. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2007 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	37,31	13,71
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,59	11,17
3.	Industri Pengolahan	13,65	27,06
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,66	0,88
5.	Konstruksi	5,05	7,73
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,30	14,92
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8,36	6,69
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,02	7,73
9.	Jasa-Jasa	11,05	10,11

Sumber : BPS (2009, h.92)

Berdasarkan Tabel 12. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Lampung dengan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.13. berikut :

Tabel 13. Perbandingan Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2008 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	38,63	14,40
2.	Pertambangan dan Penggalian	3,10	10,97
3.	Industri Pengolahan	13,06	27,87
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,59	0,82
5.	Konstruksi	4,40	8,46
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,64	13,97
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	8,94	6,31
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,41	7,43
9.	Jasa-Jasa	11,24	9,77

Sumber : BPS (2009, h.93)

Berdasarkan Tabel 13. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 1.16. berikut :

Tabel 14. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2006 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	42,72	14,21
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,76	9,10
3.	Industri Pengolahan	13,19	27,83
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	0,66
5.	Konstruksi	4,95	6,08
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,72	16,92
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,01	6,76
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6,66	9,21
9.	Jasa-Jasa	7,64	9,24

Sumber : Data BPS (2009).

Berdasarkan Tabel 1.14. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka Perbandingan Distribusi Persentase dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar dan

besarannya persentasinya jauh lebih besar dari persentase PDRB nasional.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dan distribusi persentase PDB Indonesia Tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 1.17. berikut :

Tabel 15. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2007 (%)

No.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	42,55	13,83
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,52	8,73
3.	Industri Pengolahan	13,24	27,41
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,36	0,69
5.	Konstruksi	4,92	6,21
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,50	17,26
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,12	7,25
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,23	9,36
9.	Jasa-Jasa	7,54	9,27

Sumber : Data BPS (2009).

Berdasarkan Tabel 15. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka Perbandingan Distribusi Persentase

dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar dan besarannya persentasinya jauh lebih besar dari persentase PDRB nasional.

Data perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha Provinsi Lampung dan distribusi

persentase PDB Indonesia Tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 1.18. berikut :

Tabel 16. Perbandingan Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Usaha Provinsi Lampung dengan PDB Indonesia Tahun 2008 (%)

N o.	Lapangan Usaha	Lampung	Indonesia
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	41,63	13,66
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,36	8,28
3.	Industri Pengolahan	13,29	26,79
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,35	0,72
5.	Konstruksi	4,90	6,28
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	15,76	17,45
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	6,33	7,98
8.	Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	7,82	9,55
9.	Jasa-Jasa	7,55	9,30

Sumber : Data BPS (2009), h.102)

Berdasarkan Tabel 16. tersebut di atas, maka perbandingan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Lampung, maka Perbandingan Distribusi Persentase dari sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar dan besaran persentasinya jauh lebih besar dari persentase PDRB nasional.

Sebagai mana diketahui bahwa pendapatan petani hanya diterima setiap panen, sedangkan pengeluaran harus diadakan setiap hari, setiap minggu atau kadang-kadang dalam waktu yang sangat mendesak sebelum panen tiba. Untuk mengatasi hal tersebut petani biasanya mengharapkan panen di luar padi seperti sayuran, ubi, atau tanaman perdagangan lainnya. Disamping itu ternak dapat pula diusahakan untuk dijual guna memenuhi kebutuhan serupa itu.

Apabila kita melihat besaran kontribusi dari sektor pertanian terhadap PDRB Lampung memberikan yang sangat signifikan (terbesar) bila dibandingkan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun demikian tingkat produktivitas di sektor pertanian Produktivitas Pekerja Menurut Komoditas di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2008 tidak ada peningkatan yang berarti, begitu juga tingkat pendapatan dari sektor pertanian di Provinsi Lampung sampai tahun 2009 cenderung menurun, bila dibandingkan dengan sektor industri dan sektor jasa.

Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian pada identifikasi di atas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh lahan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
3. Bagaimana pengaruh teknologi dan SDM terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
4. Bagaimana pengaruh energi terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
5. Bagaimana pengaruh sarana produksi pertanian terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
6. Bagaimana pengaruh modal terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
7. Bagaimana pengaruh kelembagaan dan kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung
8. Bagaimana pengaruh lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kelembagaan dan kebijakan secara simultan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung

9. Bagaimana pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung

BAHAN DAN METODE

Pembangunan Ekonomi Pertanian.

Pembangunan Ekonomi

Pembangunan (*development*) menurut Todaro (2000, h. 17) diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas pendapatan nasional bruto atau GNP (*Gross National Product*)-nya pada tingkat 5 persen hingga 7 persen, atau bahkan lebih tinggi lagi, jika hal itu memang memungkinkan.

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Pengertian pembangunan ekonomi telah mengalami perubahan yang mencakup dimensi yang lebih luas, terpadu dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Oleh sebab itu pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan bukan sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir (Todaro dalam Suryana, 2000, h. 4).

Pembangunan ekonomi adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat atau GDP dimana kenaikannya dibarengi oleh perombakan dan modernisasi serta memperhatikan aspek pemerataan pendapatan (*income equity*) (Suryana, 2000, h. 5).

Menurut Mudrajad Kuncoro (2003, h. 45), proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik.

Ekonomi Pertanian.

Menurut Kuznet (dalam Suryana, 2000), pertanian merupakan sektor ekonomi potensial dalam empat bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu kontribusi produk, kontribusi pasar, kontribusi faktor-faktor produksi, dan kontribusi devisa.

1. Kontribusi produk, diartikan bahwa produk-produk pertanian sangat menentukan pengembangan sektor ekonomi lainnya melalui suplai makanan (konsumsi) dan penyedia bahan-bahan baku (ketersediaan produksi) bagi kegiatan industri. Dalam konteks ekonomi makro, sektor pertanian memiliki kontribusi penting terhadap PDB. Naik turunnya peran sektor pertanian berasosiasi dengan tiga aspek yaitu pangsa awak produk sektor non pertanian, pertumbuhan output pertanian yang rendah, pertumbuhan output sektor non pertanian yang lebih tinggi (Ghatak dan Ingersent, dalam Suryana 2000).
2. Kontribusi pasar, yaitu besarnya penduduk yang bekerja di sektor pertanian dan intensitas pembangunan pertanian yang tinggi, khususnya di awal pembangunan merupakan sumber pertumbuhan yang penting bagi pasar domestik untuk produk-produk dari industri, termasuk pasar untuk barang-barang produsen (input produksi pertanian) maupun barang-barang konsumsi. Besar kecilnya kontribusi pasar tergantung dari sistem ekonomi dan jenis teknologi yang dipakai dalam pertanian.
3. Kontribusi faktor-faktor produksi, sektor pertanian dianggap sebagai sumber modal untuk investasi, melalui proses transfer surplus kapital dan tenaga kerja dari pertanian ke sektor non pertanian. Menurut Lewis (1980), dalam proses pertumbuhan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga kerja pertanian (pedesaan) ke sektor industri dan jasa (perkotaan) karena terjadinya perbedaan tingkat produktivitas di antara dua sektor tersebut. Untuk menjamin adanya *market surplus* dan proses transfer tersebut maka sektor pertanian harus memperbaiki kinerjanya melalui kekuatan dari sisi penawaran (teknologi, sumberdaya manusia, infrastruktur) dan sisi permintaan terutama nilai tukar produksi pertanian dan non pertanian dan keterkaitan antar industri. Oleh karena itu kebijakan makro seperti kredit perbankan, investasi, dan kebijakan moneter sangat menentukan kelancaran transfer kapital tersebut.
4. Kontribusi devisa, yaitu sektor pertanian mampu berperan sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan atau neraca pembayaran (devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian atau ekspansi produksi dari komoditi-komoditi

pertanian yang menggantikan impor (substitusi impor).

Simatupang dan Syafaat, dalam Tambunan (2000, h. 45) mengatakan bahwa keterkaitan sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan output nasional tidak hanya keterkaitan produksi, tetapi juga keterkaitan konsumsi atau pendapatan dan keterkaitan investasi Sektor pertanian mempunyai tiga fungsi, meliputi ; pertama, sebagai sumber investasi sektor non pertanian, dimana surplus uang di sektor pertanian menjadi sumber dana investasi di sektor lain ; kedua, sebagai sumber bahan baku atau input bagi sektor lainnya, khususnya agroindustri dan perdagangan ; ketiga, melalui peningkatan permintaan pasar output, sebagai sumber diversifikasi produksi di sektor ekonomi lainnya.

Selain itu pembangunan sektor pertanian merupakan media efektif untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan, karena sektor pertanian pedesaan memiliki kontribusi kemiskinan paling besar (Ikhsan, 2001). Peningkatan produktivitas pertanian akan secara simultan meningkatkan standar hidup petani, mengurangi kemiskinan, meningkatkan penyerapan pasar domestik terhadap produk industri, dan meningkatkan kegiatan perdagangan (Lewis, 1980).

Stagnasi perkembangan pertanian tidak baik untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sebab dapat menghambat pertumbuhan industri dan bisa menyebabkan instabilitas ekonomi dan politik akibat kekurangan produk makanan (Alexandratos, 1995). Sektor pertanian juga sangat potensial untuk menjadi sektor yang memimpin (*leading sector*) karena potensinya sebagai motor penggerak pertumbuhan output dan nilai tambah sektor ekonomi lainnya (Adelman, 1989 ; Kotler 1997, dikutip Tambunan, 2003,103). Semakin besar ketergantungan sektor lain kepada sektor pertanian maka semakin besar potensi sektor pertanian sebagai *leading sector*. Hal ini terutama terjadi pada banyak daerah di Indonesia yang memiliki potensi sektor pertanian (Simatupang dan Syafaat, 2000). Konsep dasar pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi nasional dan regional dinyatakan bahwa : "Sektor andalan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung dan mesin penggerak perekonomian sehingga dapat disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin".

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Boediono (1999, h. 1), adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Perhatiannya ditekankan pada 3 (tiga) aspek, yaitu : proses, output

per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi (*economics growth*) menurut Suryana (2000, 5), diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat menurut Lincoln Arsyad (1999, h. 214) adalah :

- a. Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fisik, dan sumberdaya manusia (*human resources*).
- b. Pertumbuhan penduduk.
- c. Kemajuan teknologi.

Menurut Jhingan (2000, h. 67), proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor, faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia modal, usaha, teknologi dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi selama lembaga sosial, kondisi politik, dan nilai-nilai moral dalam suatu bangsa tidak menunjang. Didalam pertumbuhan ekonomi, lembaga sosial, sikap budaya, nilai moral, kondisi politik dan kelembagaan merupakan faktor non ekonomi.

Pendapatan Nasional

Ada dua arti dari Pendapatan Nasional, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit Pendapatan Nasional (PN) hanya Pendapatan Nasional. Sedangkan dalam arti luas, PN dapat merujuk ke Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Nasional Neto (PNN). Hubungan antara PDB dan PN dapat dijabarkan sebagai berikut (Tambunan, 2009, h. 45) :

$$\begin{aligned} \text{PNB} &= \text{PDB} + F \\ \text{PNN} &= \text{PNB} - D \\ \text{PN} &= \text{PNN} - \text{Ttl} \end{aligned}$$

Dimana :

- F = Pendapatan Neto atas faktor luar negeri
D = Penyusutan
Ttl = Pajak Tak Langsung Neto.

Jika persamaan digabungkan menjadi persamaan sebagai berikut :

$$PDB = PN + Ttl + D - F$$

atau

$$PN = PDB + F - D - Ttl$$

PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Dua pendekatan pertama tersebut adalah pendekatan dari sisi penawaran agregat, sedangkan pendekatan pengeluaran adalah penghitungan PDB dari sisi permintaan agregat. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output (NO) dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. Badan Pusat Statistik (BPS) membagi ekonomi nasional ke dalam 9 (sembilan) sektor : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Jadi, PDB adalah jumlah ke sembilan sektor tersebut.

$$PDB = \sum N O_i, \text{ dimana } i = 1, 2, \dots, 9$$

Sedangkan pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi di masing-masing sektor, seperti tenaga kerja (gaji/upah), pemilik modal (bunga/hasil investasi), pemilik tanah (hasil jual/sewa tanah), dan pengusaha (keuntungan bisnis /perusaha). Pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto (NTB) dari sembilan sektor tersebut :

$$PDB = NTB_1 + NTB_2 + \dots + NTB_9$$

Pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir yaitu : pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta *non-profit oriented* (C), pembentukan modal tetap domestik bruto termasuk perubahan stok (I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G), ekspor (X) dan impor (M). Jadi :

$$PDB = C + I + G + (X - M)$$

Berdasarkan uraian di atas, pembangunan sektor ekonomi akan sangat bergantung pada upaya-upaya peningkatan investasi, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi, peningkatan pengeluaran pemerintah, dan peningkatan ekspor serta pengurangan besaran import.

Pembangunan Sektor Pertanian

a. Pengertian dan Karakteristik Ilmu ekonomi pertanian

Ekonomi pertanian adalah termasuk di dalam kelompok ilmu-ilmu kemasyarakatan (*social sciences*), yaitu ilmu yang mempelajari perilaku dan upaya serta hubungan antarmanusia. Dengan pengertian yang demikian, maka analisa ekonomi perusahaan pengolahan hasil pertanian, perdagangan internasional atas hasil pertanian, kebijaksanaan pertanian, hukum dan hak pertanahan termasuk bidang-bidang yang harus dipelajari dalam ekonomi pertanian. Dengan demikian ilmu ekonomi pertanian adalah bagian dari ilmu ekonomi umum yang mempelajari fenomena-fenomena dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertanian mikro maupun makro.

Ilmu ekonomi pertanian bersumber pada dua jenis cabang ilmu: Ilmu Pertanian atau usahatani dan Ilmu Ekonomi. Dengan demikian ekonomi pertanian merupakan aplikasi prinsip-prinsip ilmu ekonomi di bidang pertanian. Persepsi bahwa ekonomi pertanian semata-mata mencakup praktek-praktek produksi pertanian dan peternakan tidak dapat dibenarkan sebab ruang lingkup ekonomi pertanian juga menyentuh aktivitas perekonomian yang jauh lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan industri bahan pangan dan serat. Selanjutnya karena ekonomi pertanian dapat dipandang sekaligus sebagai cabang ilmu-ilmu pertanian dan ilmu ekonomi, maka ekonomi pertanian haruslah mencakup analisis ekonomi dari proses teknis produksi serta hubungan-hubungan sosial dalam produksi pertanian.

Sektor pertanian dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produk ialah pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas terdiri dari 5 (lima) subsektor yaitu (Dumairy, 1996, 204) :

1) Subsektor tanaman pangan.

Subsektor tanaman pangan sering juga disebut subsektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat, maksudnya bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Subsektor ini mencakup komoditas-komoditas bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, serta sayur-sayuran dan buah-buahan.

2) Subsektor perkebunan.

Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat ialah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil-hasil tanaman perkebunan rakyat terdiri antara lain atas karet, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat, dan berbagai rempah-rempah.

Termasuk juga dalam kelompok ini produk ikutannya dan hasil-hasil pengolahan sederhana terhadap komoditas-komoditas tersebut. Adapun yang dimaksud dengan perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, rami, berbagai serat, dan masih banyak lagi.

3) Subsektor kehutanan.

Subsektor kehutanan terdiri atas 3 (tiga) macam kegiatan yaitu penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain, dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu-kayu glondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, serta berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Sedangkan kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, dan buaya.

4) Subsektor peternakan.

Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, telur, susu segar, wool, dan hasil pemotongan hewan.

5) Subsektor perikanan.

Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba, serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan dan pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, subsektor ini dibedakan atas 3 (tiga) macam sektor yaitu perikanan laut, perikanan darat, dan penggaraman. Komoditas yang tergolong subsektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan semacamnya.

b. Agribisnis

Agribisnis (ada pula yang menyebutnya agrobisnis) merupakan suatu cara lain untuk melihat pertanian sebagai suatu sistem bisnis yang terdiri dari 4 (empat) subsistem yang terkait satu sama lain. Keempat subsistem tersebut adalah (Saragih, 2010, h. 73) :

1) Subsistem agribisnis hulu

Subsistem agribisnis hulu mencakup semua kegiatan untuk memproduksi dan menyalurkan input-input pertanian dalam arti luas. Dengan demikian, didalamnya termasuk kegiatan pabrik pupuk, usaha pengadaan bibit unggul, baik untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, ternak maupun ikan; pabrik pakan untuk ternak dan ikan; pabrik pestisida; serta kegiatan perdagangannya.

2) Subsistem agribisnis usahatani

Subsistem agribisnis usahatani merupakan kegiatan yang selama ini dikenal sebagai kegiatan

usahatani, yaitu kegiatan di tingkat petani, pekebun, peternak dan nelayan, serta dalam arti khusus, termasuk pula kegiatan kehutanan ; yang berupaya mengelola input-input (lahan, tenaga kerja, modal, teknologi dan manajemen) untuk menghasilkan produk pertanian.

3) Subsistem agribisnis hilir

Subsistem agribisnis hilir, sering pula disebut sebagai kegiatan agroindustri adalah kegiatan industri yang menggunakan produk pertanian sebagai bahan baku. Kegiatan pabrik minyak kelapa sawit, industri pengalengan ikan, pabrik tepung tapioka dan banyak kegiatan lain termasuk dalam kelompok subsistem ini. Subsistem perdagangan hasil pertanian atau hasil olahannya merupakan kegiatan terakhir untuk menyampaikan output sistem agribisnis kepada konsumen, baik konsumen di dalam negeri maupun konsumen luar negeri (ekspor). Kegiatan-kegiatan pengangkutan dan penyimpanan merupakan bagian dari subsistem ini.

4) Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*).

Subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yaitu kegiatan jasa yang melayani pertanian seperti kebijakan pemerintah, perbankan, penyuluhan, pembiayaan dan lain-lain. Secara ringkas dapat dinyatakan, sistem agribisnis menekankan pada keterkaitan dan integrasi vertikal antara beberapa subsistem bisnis dalam satu sistem komoditas.

Pendekatan dengan sistem agribisnis akan memperbesar potensi pertanian, karena akan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi produk-produk pertanian dan dapat mendorong tingkat efisiensi usaha yang semakin tinggi. Integrasi vertikal dalam agribisnis menyebabkan perolehan nilai tambah sektor pertanian akan berkait serta saling mempengaruhi dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sector industri, perdagangan, dan jasa.

Sumbangan agribisnis bagi perekonomian dapat dipastikan akan jauh lebih besar dari sumbangan sektor pertanian. Sumbangan yang besar disertai dengan keterkaitan ekonomi yang luas dengan kegiatan lain menyebabkan agribisnis menjadi kegiatan ekonomi yang sangat penting.

Agribisnis juga memiliki peluang-peluang usaha baru yang masih potensial, seperti sistem agribisnis berbagai komoditas hortikultura (buah, sayur, bunga, jamur, rempah-rempah dan lain-lain), rumput laut, berbagai komoditas perikanan, agroindustri lanjutan hasil tanaman pangan dan perkebunan, serta industri pakan ternak dan ikan. Dengan prinsip keterkaitan, dalam sistem agribisnis juga akan terbuka peluang usaha dalam bidang transportasi, penyimpanan, jasa informasi, lembaga pembiayaan, asuransi dan

sebagainya. Peluang-peluang tersebut akan lebih banyak lagi jika pada pengembangannya juga diusahakannya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada tiap subsistem atau tiap unit usaha.

c. Model Pembangunan Pertanian

Johnston dalam Mubyarto (1995, 225), mengemukakan model-model yang dapat dipilih oleh negara-negara yang kini sedang berkembang yaitu model Jepang, model Mexico, model Stalin dan model Israel. Masing-masing dengan ciri khasnya dan dengan kelebihan-kelebihan serta kekurangan-kekurangannya, dan diambil sebagai contoh untuk ditiru oleh negara-negara berkembang lainnya yang sampai kini belum begitu berhasil membangun pertaniannya. Model Stalin diikuti oleh negara-negara sosialis Eropa Timur, Cina, Kuba dan lain-lain. Model Israel dipelajari dengan tekun oleh negara-negara Afrika. Model Jepang dan Mexico merupakan dua model yang sangat berbeda. Yang satu didasarkan atas usahatani kecil-kecil (seperti Indonesia) sedangkan yang terakhir didasarkan atas perusahaan pertanian yang komersial yang sangat efisien dan jumlahnya tidak banyak.

Mosher dalam Mubyarto (1995, 230), menganalisa syarat-syarat pembangunan pertanian di banyak negara dan menggolong-golongkannya menjadi syarat-syarat mutlak dan syarat-syarat pelancar. Menurut Mosher dalam Mubyarto (1995, h. 230), ada 5 (lima) syarat yang tidak boleh tidak harus ada untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja syarat-syarat tersebut tidak ada maka terhentilah pembangunan pertanian; pertanian dapat berjalan terus tapi statis. Syarat-syarat mutlak itu adalah :

- 1) Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani.
- 2) Teknologi yang senantiasa berkembang.
- 3) Tersedianya bahan-bahan atau alat-alat produksi secara lokal.
- 4) Adanya perangsang produksi bagi petani, dan
- 5) Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Disamping syarat-syarat mutlak yang lima itu menurut Mosher dalam Mubyarto (1995, 231), ada 5 (lima) syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar pembangunan pertanian. Yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar adalah :

- 1) Pendidikan pembangunan.
- 2) Kredit produksi.
- 3) Kegiatan gotong royong petani.
- 4) Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.
- 5) Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

d. Teori Pembangunan Pertanian

Teori-teori pembangunan pertanian dan pembahasan atas aspek-aspek ekonomi dari

pembangunan pertanian dan persoalan-persoalan pertanian pada umumnya dibagi dalam 4 (empat) segi pandangan yaitu :

- 1) Pandangan sektoral yaitu pertanian ditinjau dari satu sektor berhadapan dengan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian nasional.
- 2) Masalah efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi pertanian.
- 3) Pendekatan dari segi komoditi terutama komoditi-komoditi utama yang dihasilkan, dan
- 4) Pendekatan dari segi pembangunan daerah.

Menurut Mellor dalam Mubyarto (1995, h. 238), secara makro pembangunan pertanian dapat dianalisa melalui 3 (tiga) kerangka pemikiran yaitu :

- 1) Peranan pertanian dan pembangunan ekonomi.
- 2) Sifat-sifat ekonomi pertanian tradisional.
- 3) Proses ekonomi modernisasi pertanian.

Disamping paket penemuan baru ternyata diperlukan struktur organisasi yang baru dan "organisasi antara" lainnya yang mampu menyampaikan teknologi baru tersebut kepada petani. Organisasi-organisasi baru tersebut ternyata penting sekali karena berdasarkan penelitian sosiologi dan antropologi, masyarakat desa mempunyai sifat-sifat bawaan (*inherent*) yang tertutup dan antipati pada segala sesuatu yang datang dari luar. Organisasi-organisasi antara ini meliputi penyalur-penyalur sarana produksi, bank dan organisasi-organisasi kredit, penyuluhan dan pendidikan pembangunan serta organisasi-organisasi lain yang sebelumnya mungkin belum ada.

Disamping itu aktor organisasi yang sangat penting adalah pemerintah yang stabil dan mendedikasikan dirinya pada pembangunan dan modernisasi. Pemerintah yang berorientasi pada kemajuan (*progress orientation government*) ini adalah pemerintah yang (J. M. Brewter dalam Mubyarto, 1995, 241) :

- 1) Berwibawa dan mempunyai kekuasaan cukup besar.
- 2) Kemampuan untuk mewariskan aspirasi dan keinginan seluruh rakyat.
- 3) Kesungguhan kerja, dan
- 4) Mempunyai kemampuan profesi untuk merumuskan dan melaksanakan pembaruan-pembaruan organisasi dan kelembagaan yang saling berhubungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang mantap.

Teori Chenery pada dasarnya sama seperti pada model Lewis. Teori Chenery, dikenal dengan teori *pattern of development*, memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional (subsisten) ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh Chenery dan Ayrquin

(1975) mengidentifikasi bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita yang membawa akibat pada perubahan dalam pola permintaan konsumen (dari produk makanan dan barang-barang kebutuhan pokok (pangan) ke berbagai macam barang-barang manufaktur dan jasa), akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota-kota dan industri-industri di *urban* bersamaan dengan proses migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan, dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan *family size* yang semakin kecil, struktur perekonomian suatu negara bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor pertanian dan sektor pertambangan menuju ke sektor-sektor non primer, khususnya industri.

Hasil penelitian Chenery (1979) menunjukkan bahwa terjadinya penurunan kontribusi sektor pertanian, baik dalam PDB (Produk Domestik Bruto) maupun kesempatan kerja, akan diimbangi dengan peningkatan yang pesat pada kontribusi sektor industri, sedangkan kontribusi sektor jasa tidak menunjukkan perubahan yang besar. Dengan bertambahnya pendapatan per kapita, maka terjadi pergeseran sumberdaya, baik fisik maupun manusia. Pada tahap selanjutnya, proses ini akan mempengaruhi ; pola permintaan dalam negeri, pola produksi dalam negeri, dan pola perdagangan luar negeri. Keadaan tersebut merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Segi permintaan didominasi oleh pengaruh perkembangan permintaan masyarakat, sedangkan segi penawaran dipengaruhi oleh perubahan persentase penggunaan sumberdaya dan teknologi.

Transformasi struktural dapat dilihat pada perubahan pangsa nilai output atau nilai tambah dari setiap sektor di dalam pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) dan kemampuannya dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil studi dari Chenery dan Ayrquin (1975), menunjukkan bahwa pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah (tahap awal pembangunan ekonomi), sektor-sektor primer merupakan kontribusi terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir), sektor-sektor sekunder terutama industri menjadi sangat penting dalam penyerapan kesempatan kerja, sebaliknya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian menurun terus menerus.

Secara umum pertumbuhan ekonomi disertai dengan peralihan dan pergeseran permintaan secara berangsur-angsur dari kegiatan sektor produksi primer (pertanian dan pertambangan) ke sektor produksi sekunder (manufaktur dan konstruksi) dan ke sektor tersier (jasa) yang mengakibatkan perubahan dalam struktur produksi melalui pergeseran kesempatan kerja dan alokasi dana.

Sundrum dalam Mubyarto (1995), menggabungkan antara fungsi produksi Cobb-Dougllass dalam pertumbuhannya dan pergeseran struktur, yaitu sebagai berikut :

$$Q = A_t \cdot K_t^\alpha \cdot L_t^\beta$$

$$= (K_a \cdot G_a + K_n \cdot G_n + K_s \cdot G_s)$$

Keterangan :

Q	=	output (pertumbuhan ekonomi)
A_t	=	tingkat teknologi pada tahun t
K_t	=	modal pada tahun t
L_t	=	tenaga kerja pada tahun t
α	=	elastisitas produksi dari input modal
β	=	elastisitas produksi dari masukan tenaga kerja
K_a, K_m, K_s	=	proporsi sektor pertanian, industri, dan jasa
G_a, G_m, G_s	=	pertumbuhan sektor pertanian, industri, dan jasa

e. Program Pembangunan Pertanian

Saragih, (2010, h. 244), menyatakan bahwa Program pembangunan pertanian (secara lebih dalam yaitu sistem dan usaha agribisnis) pada hakekatnya adalah rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani, dan mendorong berkembangnya sistem agribisnis dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan desentralistis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program pembangunan pertanian diarahkan kepada pencapaian tujuan pembangunan pertanian jangka panjang yaitu sektor agribisnis sebagai andalan pembangunan nasional. Program pembangunan pertanian terdiri dari :

1) Program Pengembangan Agribisnis

Program pengembangan agribisnis dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan sistem dan usaha-usaha agribisnis, yang mengarahkan agar seluruh subsistem agribisnis dapat secara produktif dan efisien menghasilkan berbagai produk pertanian yang memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi, baik di pasar domestik maupun pasar internasional.

Tujuan program ini adalah :

- Mengembangkan subsistem hulu.
- Mengembangkan subsistem on-farm.
- Mengembangkan subsistem pengolahan.
- Mengembangkan subsistem pemasaran.
- Mengembangkan subsistem penunjang sebagai satu kesatuan sistem yang sinergis.

Adapun yang menjadi sasaran program adalah :

- Berkembangnya semua subsistem agribisnis secara serasi dan seimbang.
- Berkembangnya usaha-usaha agribisnis.

Operasionalisasi program pengembangan agribisnis diurai dalam subprogram yang lebih

terfokus. Pengembangan agribisnis berbasis komoditas prioritas dengan pertimbangan khusus dalam skala nasional maupun daerah menjadi acuan semua instansi terkait dalam menyusun kegiatan penunjang mulai dari hulu sampai dengan hilir. Operasionalisasi program pengembangan agribisnis terdiri dari subprogram-subprogram berikut :

- a) Subprogram pengembangan agribisnis berbasis tanaman pangan.
- b) Subprogram pengembangan agribisnis berbasis hortikultura.
- c) Subprogram pengembangan agribisnis berbasis perkebunan.
- d) Subprogram pengembangan agribisnis berbasis peternakan.
- e) Subprogram pengembangan SDM dan kelembagaan usaha agribisnis.
- f) Subprogram pengembangan kelembagaan pelayanan penunjang agribisnis.
- g) Subprogram pengembangan agribisnis berwawasan lingkungan (*eco-agribusiness*).
- h) Subprogram pengembangan teknologi strategis dan wilayah.
- i) Subprogram pendayagunaan dan perlindungan sumberdaya hayati.
- j) Subprogram pengembangan sistem informasi dan jaringan kerja agribisnis.

2) Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan yang cukup, tersedia setiap saat di semua daerah mudah diperoleh rumah tangga, aman dikonsumsi dan harga yang terjangkau. Ketahanan pangan rumah tangga berkaitan dengan kemampuan rumah tangga untuk dapat akses terhadap pangan di pasar. Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, dan kemampuan daya beli rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatan. Dengan demikian maka peningkatan pendapatan rumah tangga.

merupakan faktor kunci dari Program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat masyarakat. Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan.

Tujuan dari program ini adalah :

- a) Menciptakan iklim yang kondusif bagi berfungsinya subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi.

- b) Meningkatkan ketersediaan pangan dalam jumlah, mutu dan keragaman.
- c) Mengembangkan sistem distribusi dengan tingkat harga yang terjangkau.
- d) Meningkatkan penganeekaragaman hasil pangan olahan.
- e) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan,
- f) Meningkatkan kewaspadaan pangan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a) Dicapainya tingkat ketersediaan pangan tingkat nasional dan masyarakat yang cukup,
- b) Berkembangnya kemitraan usaha para pelaku agribisnis untuk meningkatkan ketahanan pangan.
- c) Meningkatnya keanekaragaman konsumsi dan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras.
- d) Menurunnya tingkat kerawanan pangan masyarakat.

f. Lahan

Faktor utama yang mempengaruhi perkembangan suatu perekonomian adalah sumber alam atau tanah. Tanah sebagaimana dipergunakan dalam ilmu ekonomi mencakup sumber alam seperti kesuburan tanah, letak dan susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, sumber air, sumber lautan, dan sebagainya. Dalam dan bagi pertumbuhan ekonomi, tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Suatu negara yang kekurangan sumber alam tidak akan dapat membangun dengan cepat (Jhingan, 2000, h. 68).

Menurut Hanafie (2010, h. 52), tanah adalah tubuh alam yang tersusun dalam bentuk profil. Tanah terdiri dari berbagai campuran mineral pecah lapuk dan organik pengurai, sebagai lapisan tipis penutup permukaan bumi, serta menjamin tumbuhnya tumbuhan, hewan dan manusia.

Pengaruh tanah dalam pertanian dapat dibedakan secara makro dan mikro. Secara makro, tanah sangat menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu daerah. Dalam pandangan makro, tanah dibagi atas dasar topografi, kesesuaian penggunaan, ekologi lahan, dan jenis tanah. Menurut topografinya, lahan dibedakan kemiringannya menjadi 4 (empat), antara lain :

- 1) Lahan dengan lereng 0 – 3 %; datar, termasuk rawa-rawa, untuk tanaman padi atau perkebunan kelapa.
- 2) Lahan dengan lereng 3 – 8 %; baik untuk tanaman setahun tertentu apabila dibuat teras atau kontur.
- 3) Lahan dengan lereng 8 – 15 %; baik untuk tanaman rumput sehingga cocok untuk area peternakan.

- 4) Lahan dengan lereng > 15 %; baik untuk tanaman kayu sehingga cocok dijadikan area perkebunan atau kehutanan.

Berdasarkan penguasaannya atas sebidang lahan, petani dibedakan menjadi petani pemilik-penggarap, petani penyewa, petani penyakap, dan buruh tani yang tidak mempunyai kewenangan sedikit pun atas sebidang tanah. Berdasarkan luas lahan yang dimiliki, ada petani kaya pemilik lahan luas, petani menengah pemilik lahan sedang, dan petani gurem pemilik lahan sempit. Penggunaan lahan/tanah dalam bidang pertanian meliputi usaha tani tanaman padi dan/atau palawija, usaha tani tanaman hortikultura, usaha tani tanaman perkebunan, usaha tani tanaman kehutanan, usaha tani ternak/unggas, budidaya ikan/biota lain di air tawar, budi daya ikan/biota lain di tambak air payau, dan usaha penangkaran satwa liar.

Secara mikro, pengaruh tanah dalam pertanian dilihat dari penguasaan lahan, luas lahan, dan nilai lahan. Macam-macam lahan menurut kepemilikan oleh petani dibedakan menjadi :

- 1) Lahan yang dibeli, baik kontan maupun angsuran.
- 2) Lahan warisan, yaitu lahan yang diterima oleh ahli waris berdasarkan pembagian dari harta orangtua yang telah meninggal dunia.
- 3) Lahan yang diperoleh secara hibah, yaitu lahan yang diterima/didapat secara cuma-cuma dari badan/harta orang yang masih hidup.
- 4) Lahan yang dimiliki berdasarkan *land reform*, permohonan biasa, pembagian lahan transmigrasi, pembagian lahan dari pembukaan hutan, hukum adat, atau penyerahan dari program Perkebunan Inti Rakyat (PIR).
- 5) Lahan sewa, yaitu lahan yang didapat dengan perjanjian sewa, yang besarnya sewa sudah ditentukan terlebih dahulu tanpa melihat besar/kecilnya hasil produksi. Pembayaran sewa dapat berupa uang atau barang. Dalam sewa-menyewa, pemilik lahan tidak ikut menanggung ongkos-ongkos produksi dan risiko dari penggarapan lahannya.
- 6) Lahan bagi hasil (sakap) yaitu lahan sewa, tetapi dengan perjanjian besarnya sewa berdasarkan hasil panen/produksi dan dibayarkan setelah panen. Besarnya bagian yang akan diserahkan pada pemilik lahan sudah ditentukan lebih dahulu, seperti setengah atau sepertiga hasil produksi.
- 7) Lahan gadai, yaitu lahan yang berasal dari pihak lain sebagai jaminan pinjaman uang pihak yang menggadaikan lahannya. Lahan tersebut dikuasai oleh orang yang memberi pinjaman uang sampai pemilik lahan membayar kembali hutangnya.
- 8) Lahan bengkok/pelungguh, yaitu lahan milik desa/kelurahan yang dikuasakan kepada pamong

desa atau bekas pamong desa sebagai gaji atau pensiun.

- 9) Lahan bebas sewa, serobotan, dan lahan garapan. Lahan bebas sewa adalah lahan yang didapatnya dengan tanpa membeli atau membayar sewa dan bukan merupakan lahan milik, tetapi hanya diizinkan memakai dengan bebas sewa.
- 10) Lahan yang dikuasai adalah lahan milik sendiri ditambah lahan yang berasal dari pihak lain dan dikurangi lahan yang berada di pihak lain. Lahan tersebut berupa lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah.
- 11) Lahan pertanian adalah lahan yang dikuasai dan pernah diusahakan untuk pertanian selama setahun yang lalu. Lahan tersebut mencakup lahan sawah, huma, ladang, tegal/kebun, kolam/tebat/empang, tambak, lahan perkebunan, hutan, dan lahan untuk penggembalaan/padang rumput.
- 12) Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galangan), saluran untuk menahan/menyalurkan air yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut. Dalam hal ini, termasuk lahan yang hanya terdaftar di Pajak Bumi Bangunan (PBB), lahan bengkok, lahan serobotan, dan rawa yang ditanami padi.
Lahan sawah dibedakan menjadi :
 - a) Lahan sawah irigasi (berpengairan), yaitu lahan sawah yang mendapatkan air dari sistem irigasi, baik bangunan penyadap dan jaringannya yang dikelola oleh instansi pemerintah seperti Dinas Pengairan maupun oleh masyarakat.
 - b) Lahan sawah tanpa irigasi (tak berpengairan) yang meliputi sawah tadah hujan (sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan), sawah pasang-surut (sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang-surutnya air laut), dan sawah lainnya (misalnya lebak, polder, lahan rawa yang ditanami padi, dan lain-lain).
- 13) Lahan bukan sawah adalah semua lahan selain lahan sawah yang biasanya ditanami dengan tanaman musiman atau tanaman tahunan, lahan untuk kolam atau untuk kegiatan usaha pertanian lainnya. Lahan bukan sawah meliputi huma, ladang, tegal, kebun, kolam/tebat/empang, dan lahan perkebunan.
- 14) Huma adalah lahan kering yang biasanya ditanami tanaman musiman dan penggunaannya hanya semusim atau dua musim, kemudian ditinggalkan bila sudah tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun kemudian akan dikerjakan kembali bila kesuburannya kembali.

- 15) Lahan/tegal/kebun adalah lahan kering yang ditanami tanaman musiman atau tanaman tahunan, serta terpisah dengan halaman sekitar rumah dan penggunaannya tidak berpindah-pindah. Lahan yang dibiarkan kosong kurang dari 1 (satu) tahun (menunggu masa penanaman yang akan datang) dianggap sebagai kebun/tegal apabila hendak ditanami tanaman musiman/tahunan atau dianggap sebagai lahan perkebunan apabila akan ditanami tanaman perkebunan.
- 16) Lahan tidur adalah lahan yang biasanya digunakan untuk usaha pertanian, tetapi tidak dimanfaatkan lebih dari 2 (dua) tahun.

Menurut Addinul Yakini (2004, h. 67), pendayagunaan sumber daya pertanian menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga sumber daya yang terbatas itu harus dialokasikan seefektif mungkin. Sumber daya pertanian terdiri dari lahan, tenaga kerja, air, termasuk unsur-unsur yang terkandung didalamnya merupakan sumber daya utama untuk kelangsungan hidup manusia. Pengelolaan yang tidak bijaksana dan tidak mengacu ke depan akan berakibat menurunnya kualitas sumber daya itu sendiri, yang akhirnya berpengaruh terhadap produktivitas pertanian.

g. Infrastruktur

Irigasi (termasuk waduk sebagai sumber air) merupakan bagian terpenting dari infrastruktur pertanian. Ketersediaan jaringan irigasi yang baik, dalam pengertian tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas, dapat meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas pertanian, terutama tanaman pangan, secara signifikan. Jaringan irigasi yang baik akan mendorong peningkatan indeks pertanaman (IP) (Damardono dan Prabowo dalam Tambunan, 2009, h. 154). Sedangkan menurut Hilman Manan dalam Tambunan, (2009, h. 154), rata-rata IP lahan sawah di Indonesia hanya 1,57 kali, yang artinya, dalam satu tahun rata-rata lahan pertanian di Indonesia, ditanami kurang dari 2 kali musim tanam. Di Pulau Jawa, IP rata-rata di atas 2, tetapi di luar Pulau Jawa umumnya 1 hingga 1,3 kali. Bagi petani, semakin tinggi IP semakin besar pendapatannya, berarti ia semakin bersemangat meningkatkan produksinya.

Keberadaan infrastruktur tidak hanya dibutuhkan untuk mendukung usaha agribisnis yang sudah ada, tapi juga merangsang tumbuhnya usaha-usaha baru yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis. Pengembangan infrastruktur sebagai bagian dari pelayanan publik akan lebih efektif apabila : (1) sesuai dengan kebutuhan/kepentingan publik, (2) mampu menunjang pengembangan usaha yang dilakukan masyarakat banyak, dan (c) mampu merangsang tumbuhnya usaha-usaha atau investasi baru yang

dapat memacu perkembangan ekonomi wilayah. Dalam kaitannya dengan pembangunan sistem dan usaha agribisnis, maka kebijakan pembangunan infrastruktur perlu diarahkan pada infrastruktur yang dibutuhkan oleh banyak usaha agribisnis. Infrastruktur seperti sarana pengairan dan drainase, jalan, listrik, *farm road*, pelabuhan (khususnya pelabuhan-pelabuhan ekspor baru di wilayah timur Indonesia), transportasi dan telekomunikasi merupakan prasarana yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis.

h. Teknologi dan Sumber Daya Manusia

Teknologi dan sumber daya manusia (SDM), bukan hanya jumlah, tetapi juga kualitas, sangat menentukan keberhasilan Indonesia dalam mencapai ketahanan pangan. Bahkan dapat dipastikan bahwa pemakaian teknologi dan input-input modern tidak akan menghasilkan output yang optimal apabila kualitas petani dalam arti pengetahuan atau wawasannya mengenai teknologi pertanian, pemasaran, standar kualitas dan lain-lain rendah. Lagipula, teknologi dan SDM adalah dua faktor produksi yang sifatnya komplementar dan ini berlaku di semua sektor, termasuk pertanian (Tambunan, 2009, 155).

Pengembangan bioteknologi pada subsektor agribisnis hulu ditujukan terutama untuk mengembangkan bibit/benih unggul melalui pengembangan dan aplikasi rekayasa genetik (*genetic engineering*). Hal ini sangat penting, karena bibit/benih merupakan cetak biru atribut nutrisi dari produk-produk agribisnis yang akan dihasilkan. Hal lainnya, yang juga sangat penting adalah mengembangkan bioteknologi bibit/benih yang memiliki blue print kemampuan tanaman/hewan yang tahan terhadap penyakit (misalnya dengan mengembangkan teknologi transgenik) sedemikian rupa, sehingga dalam budidaya pada subsektor usahatani tidak menuntut (meminimalkan) penggunaan pestisida/obat-obatan, sehingga produk yang dihasilkan akan mengandung (atau bebas) dari residu pestisida/obat-obatan (memenuhi atribut keamanan pangan). Singkatnya, pengembangan bioteknologi pada subsektor agribisnis hulu ini ditujukan untuk mengembangkan bibit/benih yang mengandung cetak biru atribut produk yang dituntut konsumen, disamping memiliki kemampuan produktivitas tinggi (Saragih, 2010, h. 63).

Pada subsektor agribisnis usahatani, pengembangan teknologi diarahkan pada penggunaan teknologi budidaya yang bersahabat dengan lingkungan (*ecofarming*) dan budidaya organik (*organic farming*) seperti teknologi usahatani tanpa perlakuan (*zero/minimum tillage*), teknologi konservasi tanah dan air, teknologi biologi tanah, teknologi pemberantasan penyakit secara biologis dan lain-lain. Dengan demikian, komoditas

primer yang dihasilkan dari subsektor pertanian primer ini memenuhi tuntutan pelabelan bersahabat terhadap lingkungan (*ecolabeling*) dan tuntutan akan keamanan pangan (*food safety*).

Selanjutnya, pengembangan teknologi pengolahan dan teknologi produk pada subsektor agribisnis hilir (agroindustri hilir) diarahkan untuk peningkatan efisiensi, pengembangan diversifikasi teknologi pengolahan untuk menghasilkan diversifikasi produk, meminimumkan hasil buangan (*waste*) dan bahan polusi (*pollutari*), pengembangan teknologi produk yang mengakomodir atribut nilai (*value attributes*) dan atribut tentang pengemasan (*package attributes*).

Dalam upaya mempercepat dan mempertajam visi pengembangan dan pengaplikasian teknologi yang dibutuhkan pada sektor agribisnis ini sudah saatnya memiliki payung penelitian dan pengembangan teknologi agribisnis nasional yang diberi prioritas. Dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dapat berperan sebagai perencana, koordinator, dan pengevaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi (*research and development technology management*), sedangkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi diperankan oleh Pusat-pusat Penelitian Departemen Teknis (sebagai center of R&D technology) dan Lembaga/Pusat Penelitian Perguruan Tinggi sebagai satelitnya. Hasil penelitian dan pengembangan teknologi dari pusat dan satelit tersebut selanjutnya diseminasi dan diaplikasikan pada pengguna langsung oleh balai/sub balai, UPT penelitian departemen teknis dan divisi penelitian dan pengembangan perusahaan-perusahaan agribisnis. Dengan demikian, keseluruhan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi yang ada berada pada suatu jaringan penelitian dan pengembangan teknologi yang saling mendukung pada pengembangan teknologi yang dibutuhkan oleh sektor agribisnis nasional dalam menjawab tantangan masa depan.

Untuk mendukung pengembangan jaringan penelitian dan pengembangan teknologi tersebut diperlukan pengembangan sistem teknologi informasi yang berperan untuk mengkomunikasikan informasi pasar produk-produk agribisnis kepada jaringan penelitian dan pengembangan, mengefektifkan arus informasi antarkomponen jaringan, mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian dan pengembangan kepada pengguna langsung, dan mengkomunikasikan konsep dan atribut produk-produk agribisnis kepada konsumen (melalui kegiatan promosi dan iklan). Dalam membangun sistem teknologi informasi ini dapat memanfaatkan atau mendayagunakan teknologi internet, media massa dan lain-lain.

Menurut Jhingan (2000,75), sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata tergantung pada jumlah sumber daya manusia saja, tetapi lebih menekankan pada efisiensi mereka. Peningkatan GNP per kapita berkaitan erat dengan pengembangan faktor manusia sebagaimana terlihat dalam efisiensi atau produktivitas yang melonjak di kalangan tenaga buruh.

Penggunaan secara tepat sumber daya manusia untuk pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan cara berikut : *Pertama*, harus ada pengendalian atas perkembangan penduduk. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan baik apabila jumlah penduduk dapat dikendalikan dan diturunkan. Ini memerlukan keluarga berencana dan penelitian atas penduduk untuk menurunkan angka kelahiran. *Kedua*, harus ada perubahan dalam pandangan tenaga buruh. Perilaku sosial dari tenaga buruh merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan ekonomi. Untuk meningkatkan produktivitas dan mobilitas buruh, pandangan masyarakat harus diubah agar mereka bersedia menerima arti penting dan martabat buruh. Hal ini memerlukan perubahan dalam faktor kelembagaan dan sosial. Perubahan semacam ini tergantung pada penyebaran pendidikan. Hanya tenaga buruh yang terlatih dan terdidik dengan efisiensi tinggi yang akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.

Sumber daya manusia pertanian mencakup SDM agribisnis pelaku langsung seperti tenaga kerja yang bekerja pada subsektor agribisnis hulu, subsektor agribisnis pertanian primer dan subsektor agribisnis hilir, dan SDM agribisnis pendukung sektor agribisnis seperti birokrat pusat hingga ke daerah, SDM perbankan dan SDM penyedia jasa bagi agribisnis (Saragih, 2010, h. 65).

Karakteristik khusus yang dimiliki sektor agribisnis seperti ketergantungan (*interdependency*) yang kuat antar subsektor, antar unit-unit kegiatan dalam satu subsektor atau perusahaan; karakteristik produk yang merupakan produk biologis, menuntut kerja sama tim (*teamwork*) SDM agribisnis yang harmonis. Berbagai bentuk masalah ketidakefisienan dan kelambanan perkembangan sektor agribisnis di masa lalu, banyak bersumber dari ketidakharmonisan SDM atau tidak berjalannya suatu kerja sama tim (*teamwork*) yang harmonis. Pelaku ekonomi pada subsektor agribisnis hulu yang cenderung bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi perilakunya pada subsektor usahatani dan subsektor agribisnis hilir, sering menimbulkan konflik ekonomi ekonomi dalam sektor agribisnis itu sendiri. Demikian juga pelaku ekonomi pada subsistem agribisnis hilir, yang bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak

melihat konsekuensi perilakunya pada subsektor usahatani dan subsektor agribisnis hilir, sering menimbulkan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis itu sendiri. Demikian juga pelaku ekonomi pada subsistem agribisnis hilir, yang bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi tindakannya pada subsistem usahatani juga sering menciptakan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis secara keseluruhan. Kondisi ini semakin diperburuk pula oleh kebijakan atau layanan yang disediakan oleh lembaga penyedia jasa sektor agribisnis (pemerintah, perbankan dan lain-lain) yang tidak integratif dilihat tuntutan agribisnis sebagai suatu sistem, sehingga sering menciptakan optimisme pada subsektor tertentu dan pesimisme pada subsektor yang lain. Secara keseluruhan, hal-hal tersebut telah merugikan perkembangan sektor agribisnis dan tentunya juga merugikan perkembangan sektor agribisnis dan tentunya juga merugikan semua pelaku agribisnis secara keseluruhan.

Dengan latar belakang pendidikan formal dan pengalaman sumber daya agribisnis yang bervariasi, memang tidak mudah untuk membangun suatu kerja sama tim yang harmonis. Di masa lalu, pada perekrutan SDM pada perusahaan dan/atau departemen telah dilakukan penelitian pada tugas/pekerjaan tertentu (*on-the job training*) untuk meningkatkan keterampilan mengenai tugas/pekerjaan tertentu (*on-the job skill*). Namun, pembinaan SDM agribisnis yang demikian belum cukup untuk membangun suatu kerja sama tim yang harmonis. Untuk membangun suatu kerja sama tim yang harmonis dalam pengembangan sektor agribisnis, setiap SDM agribisnis harus memiliki wawasan antar tugas/pekerjaan (*cross-job*), wawasan yang luas tentang posisinya dalam perusahaan/departemen, wawasan yang luas tentang perusahaan dalam industri (*micro-behavior*), wawasan psikologi dan dinamika pasar, wawasan tentang posisi sektor agribisnis dalam perekonomian (*macro behavior*) bahkan wawasan yang luas tentang ekonomi global (*global behavior*) (Koontz dan Hill dalam Saragih, 2010, 65).

Untuk memampukan SDM agribisnis yang demikian, diperlukan suatu pelatihan antar tugas/pekerjaan (*on-the job training*), selain pelatihan pada tugas/pekerjaan tertentu (*on-the job training*) yang telah berlangsung selama ini. Esensi dari pelatihan antar tugas/pekerjaan (*cross-job training*) ini adalah untuk membina SDM agribisnis agar memiliki wawasan tentang bagaimana melaksanakan tugas masing-masing (*how to do each other's job*) melalui simulasi mengenai antar tugas/pekerjaan (*on-the job cross-training exercise*).

i. Energi

Energi menurut Pudjanarsa dan Nursuhud (2006, h. 11), adalah sesuatu yang bersifat abstrak yang sukar dibuktikan tetapi dapat dirasakan adanya. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja (*energy is the capacity for doing work*).

Menurut Hukum Termodinamika Pertama dalam Pudjanarsa dan Nursuhud (2006, h. 11), energi bersifat kekal. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dapat dikonversi dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain.

Sumber energi dapat dibedakan yang berasal dari bumi (*terrestrial*) dan yang berasal dari luar bumi (*extra terrestrial*). Sumber energi dari bumi dapat dikategorikan jenis *renewable* atau *non-depleted* dan *non renewable* atau *depleted energy*. Sumber energi yang *renewable* atau dapat didaur ulang, misalnya energi kayu, biomassa, biogas. Sumber energi dari luar bumi, misalnya energi surya dan energi sinar kosmis yang sifatnya tidak habis atau *non-depleted energy resources*. Sedangkan sumber energi seperti minyak bumi, batu bara, gas alam adalah sumber energi yang sifatnya tidak dapat diperbarui atau dapat habis.

Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur langsung adalah energi, seperti listrik atau bahan bakar minyak (BBM), yang digunakan oleh petani dalam kegiatan bertani, misalnya dalam menggunakan traktor. Sedangkan lewat jalur tidak langsung adalah energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik yang membuat input-input lainnya serta alat-alat transportasi dan komunikasi (Tambunan, 2009, h. 157).

j. Sarana Produksi Pertanian.

Menurut Hanafie (2010, h. 60), dan Tambunan (2009, h. 159), keduanya menyatakan bahwa, sektor pertanian tidak akan mampu berkembang dengan baik tanpa bantuan pemerintah dalam pengadaan sarana produksi pertanian. Hal ini dikarenakan untuk memberikan jaminan, ketersediaan, kemudahan dan kemurahan serta kualitas akan sarana produksi pertanian, hanya dapat dicapai, kalau adanya turut campur dari pemerintah terhadap keefektifan jalur distribusi, subsidi akan harga pupuk, jaminan terhadap ketersediaan dan kualitas dari bibit, serta alat-alat pertanian yang praktis, murah, dan berkualitas.

Dengan demikian bagaimana jaminan dari pemerintah atas kesetabilan harga pupuk, pestisida agar terjangkau dan masih menguntungkan bagi petani. Disamping itu perlu adanya bantuan atau arahan dari pemerintah tentang pemilihan bibit unggul (terutama padi) yang baik, tahan hama, produktivitas tinggi, jangka waktu tanam tidak

terlalu lama, untuk pertumbuhannya, tidak terlalu banyak memerlukan air.

Begitu juga petani perlu adanya bantuan dari pemerintah dalam proses pasca panen (padi), yang berupa tempat penampungan dan tempat pengeringan gabah. Disamping itu perlu ada arahan dari pemerintah untuk memperbaiki kelembagaan pemasaran hasil pertanian, baik melalui koperasi maupun lembaga lainnya, sehingga para petani tidak jatuh ke tangan para “pengijon”.

k. Modal

Menurut Jhingan (2000, h. 69), modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu, hal ini disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat menaikkan stok modal, output nasional dan pendapatan nasional. Jadi, pembentukan modal merupakan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.

Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri serta mencakup tiga tahap yang saling berkaitan : (1) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya; (2) lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan dan menyalurkannya ke jalur yang dikehendaki; dan (3) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

Pembentukan modal merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi. Di satu pihak ia mencerminkan permintaan efektif, dan di pihak lain ia menciptakan efisiensi produktif bagi produksi di masa depan. Pembentukan modal mempunyai arti penting khusus bagi negara kurang berkembang (LDC). Proses pembentukan modal menghasilkan kenaikan output nasional dalam berbagai cara. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu.

Menurut Hanafie (2010, h. 98), bagi petani di daerah pedesaan, pembentukan modal sering dilakukan dengan cara menabung (menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk keperluan masa yang akan datang). Pemerintah membantu dengan memberikan berbagai macam kredit produksi (KUT, KCK, KMKP, IDT dan lain-lain), namun belum semuanya dimanfaatkan dengan baik, baik dari segi sasaran maupun pengelolaan.

Sehubungan dengan pemilikan modal, petani diklasifikasikan sebagai petani besar, kaya, cakupan dan komersial, serta petani kecil, miskin, tidak cakupan, dan tidak komersial. Dalam pengembangan pertanian, ketersediaan modal dalam jumlah cukup dan tepat waktu merupakan unsur penting dan strategis. Modal dalam bentuk uang tunai sangat diperlukan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih

daripada itu untuk membeli sarana produk pertanian. Misalnya, bibit, pupuk, dan lain-lain yang memungkinkan petani melakukan proses produksi, yang selanjutnya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan produk usaha taninya. Sumber pembiayaan tersebut dapat berasal dari lembaga keuangan perbankan dan nonperbankan. Sumber pembiayaan nonperbankan yang telah berkembang, antara lain taskin agribisnis, modal ventura, laba BUMN, pegadaian, lembaga keuangan mikro, pola kontrak investasi kolektif (KIK) dan lain-lain.

m. Kelembagaan dan kebijakan

Menurut Hanafie (2010, h. 229), kebijaksanaan atau kebijakan mempunyai pengertian praktis dan mengandung kearifan (*wisdom*) yang pasti baik dan benar. Snodgrass dan Wallace dalam Hanafie (2010, h. 230), mendefinisikan kebijakan pertanian sebagai usaha pemerintah untuk mencapai tingkat ekonomi yang lebih baik dan kesejahteraan yang lebih tinggi secara bertahap dan kontinu melalui pemilihan komoditi yang diprogramkan, produksi bahan makanan dan serat, pemasaran, perbaikan struktural, politik luar negeri, pemberian fasilitas, dan pendidikan. Kebijaksanaan pertanian adalah serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, tingkat hidup petani lebih tinggi, dan kesejahteraan menjadi lebih merata.

Kebijakan pertanian dibagi menjadi 3 (tiga) kebijakan dasar, antara lain Hanafie (2010, h. 231) :

- 1) Kebijakan komoditi yang meliputi kebijakan harga komoditi, distorsi harga komoditi, subsidi harga komoditi, dan kebijakan ekspor.
- 2) Kebijakan faktor produksi yang meliputi kebijakan upah minimum, pajak dan subsidi faktor produksi, kebijakan harga faktor produksi, dan perbaikan kualitas faktor produksi.
- 3) Kebijakan makro ekonomi yang dibedakan menjadi kebijakan anggaran belanja, kebijakan fiskal dan perbaikan nilai tukar.

Kebijakan pengembangan agribisnis mencakup beberapa bentuk kebijakan. Pertama, kebijakan pengembangan produksi dan produktivitas di tingkat perusahaan (*farm level policy*). Kedua, kebijakan tingkat sektoral untuk mengembangkan seluruh kegiatan usaha sejenis. Ketiga, kebijakan pada tingkat sistem agribisnis yang mengatur keterkaitan antara beberapa sektor. Keempat, kebijakan ekonomi makro yang mengatur seluruh kegiatan perekonomian yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap agribisnis (Saragih, 2010, h. 76).

Kebijakan pengembangan agribisnis secara strategis dititikberatkan pada kebijakan sistem

agribisnis yang mengatur keterpaduan antar subsistemnya. Kebijakan itu sendiri harus pula didukung oleh kebijakan tingkat perusahaan yang sesuai, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, kebijakan tingkat sektoral yang tepat terutama untuk bidang penelitian, dan pengadaan sarana, serta kebijakan ekonomi makro yang kondusif bagi kegiatan pertanian terutama dalam hal nilai tukar valuta yang realistis, tingkat inflasi yang rendah, dan tingkat bunga yang wajar. Selanjutnya diperlukan kebijakan operasional yang terutama diarahkan untuk mengatasi masalah dan sekaligus mengembangkan potensi. Kebijakan operasional diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan semacam forum komunikasi yang dapat mengkoordinasikan pelaku-pelaku kegiatan agribisnis dengan penentu-penentu kebijakan yang dapat mempengaruhi sistem agribisnis secara keseluruhan ; atau subsistem di dalam agribisnis.
- 2) Forum tersebut hendaknya terdiri dari wakil-wakil pejabat pemerintah lintas departemen (terutama Departemen Pertanian, Industri Perdagangan, dan Perhubungan) serta perwakilan atau asosiasi pengusaha agribisnis.
- 3) Mengembangkan dan menguatkan asosiasi pengusaha yang terlibat dalam kegiatan agribisnis, tidak hanya asosiasi yang bergerak dalam satu subsistem saja, tetapi asosiasi yang dapat bergerak antar subsistem. Kadin merupakan lembaga yang potensial untuk melaksanakan peran tersebut dan barangkali perlu juga mengurangi kendalanya sendiri, karena saat ini masih terlalu terkompartementalisasi dalam bentuk kompartemen-kompartemen; pertanian, industri dan perdangan, mengikuti birokrasi pemerintahan. Koperasi pengusaha agribisnis juga merupakan potensi besar yang belum dikembangkan secara optimal hingga saat ini.
- 4) Mengembangkan kegiatan masing-masing subsistem agribisnis yang terutama ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan kemampuan manajemen, melalui kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi. Keterpaduan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diharapkan dapat mendorong sistem agribisnis berkembang memenuhi kebutuhan pasar domestik dan lebih dapat bersaing di pasar internasional yang semakin kompetitif.

5)

1. Kesejahteraan Ekonomi Petani

Menurut Sadono Sukirno (2006, h. 55), pendapatan per kapita dapat digunakan untuk 3 (tiga) tujuan yaitu :

- a. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu negara pada suatu tahun tertentu.

- b. Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi dunia dan di berbagai negara.

- c. Menunjukkan jurang pembangunan diantara berbagai negara.

Apabila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di beberapa negara berdasarkan pada tingkat pendapatan per kapita, maka dapat dianggap bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan per kapita masyarakat tersebut. Salah satu kelemahan penting dari pendapatan per kapita sebagai indeks tingkat kesejahteraan bersumber dari anggapan ini. Sudah lama orang meragukan kesesuaian dari anggapan bahwa tingkat pendapatan masyarakat merupakan pencerminan dari tingkat kesejahteraan yang dinikmati suatu masyarakat. Diakui bahwa pada umumnya tingkat pendapatan masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Tetapi disamping itu terdapat pula beberapa faktor lain yang adakalanya merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan.

Kalau dibandingkan keadaan kehidupan masyarakat dalam suatu negara dan diantara berbagai negara, maka akan dapat dilihat bahwa banyak faktor lain di luar tingkat pendapatan yang sangat berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan. Faktor non-ekonomi seperti pengaruh adat istiadat dalam kehidupan masyarakat, keadaan iklim dan alam sekitar, dan ada tidaknya kebebasan bertindak dan mengeluarkan pendapat merupakan beberapa faktor yang akan menimbulkan perbedaan dalam tingkat kesejahteraan di negara yang mempunyai pendapatan per kapita yang tidak banyak berbeda.

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu hal yang bersifat subjektif. Artinya, tiap orang mempunyai pandangan hidup, tujuan hidup dan cara-cara hidup yang berbeda, dan dengan demikian memberikan nilai-nilai yang berbeda terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Segolongan orang menekankan kepada pengumpulan kekayaan dan memperoleh pendapatan yang tinggi sebagai unsur penting dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Tetapi segolongan orang lainnya menekankan kepada kehidupan keagamaan sebagai unsur penting untuk mencapai kepuasan hidup yang dapat diartikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraannya yang lebih tinggi. Ada pula segolongan orang yang lebih suka memperoleh masa lapang (*leisure*) yang lebih banyak dan enggan untuk bekerja lebih keras untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Kenyataan-kenyataan bahwa ada orang yang lebih suka tinggal di kota besar walaupun memperoleh gaji yang lebih rendah daripada harus tinggal di kota kecil, dan lebih suka mengerjakan suatu pekerjaan

yang disukainya walaupun gajinya lebih rendah dari sesuatu pekerjaan lain yang mungkin diperolehnya, merupakan bukti bahwa penentuan tingkat kesejahteraan merupakan sesuatu hal yang bersifat subjektif.

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan yaitu (Sadono Sukirno, 2006, h. 55) :

- a. Komposisi umur penduduk.
- b. Distribusi pendapatan masyarakat.
- c. Pola pengeluaran masyarakat.
- d. Komposisi pendapatan nasional.

- e. Jumlah masa lapang (*leisure*) yang dinikmati masyarakat.
- f. Perubahan-perubahan dalam keadaan pengangguran.

Penelitian Sebelumnya yang relevan.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang diteliti disajikan dalam tabel di bawah ini:

NO	Judul Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Herri heriawan (2009) dengan judul peleitian adalah pengaruh pertumbuhan tenaga kerja, tingkat pendidikan, investasi, ekspor dan impor terhadap pertumbuhan sektor pertanian (Disertasi tidak dipublikasi)	Meneliti tentang aspek-aspek yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan sektor pertanian di Indonesia	Penelitian Ybs menekankan pada aspek ekspor di Indonesia dan analisisnya analisis regresi, sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung
2.	Ahmadi Rilam, 1993. Pengaruh Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-1993. (Disertasi tidak dipublikasi) Studi yang dilakukan Chow (Nixson, 2002)	Meneliti tentang aspek-aspek yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia	Penelitian Ybs menekankan pada aspek investasi di Indonesia dan analisisnya analisis Ordinary Least Square sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung
3.	Analisis penguasaan teknologi dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang mendorong pertumbuhan pembangunan infrastruktur.	Meneliti tentang peranan pendidikan teknologi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pembangunan	Penelitian Ybs menekankan pada aspek ipembangunan infrastruktur dan analisisnya analisis regresi sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung
4.	Rietveld dan Nijkamp, (1993). Analisis peranan ketersediaan dan kemurahan biaya infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi	Meneliti tentang ketersediaan dan kemurahan biaya infrastruktur terhadap pembangunan ekonomi	Penelitian Ybs menekankan pada aspek infrastruktur dan analisisnya analisis regresi sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung
5.	Nicholas C Baltas, (1999) Private Invesment and The Demand for Loanable Funds in the Greek	Meneliti tentang prilaku petani dan investasi di sektor pertanian	Penelitian Ybs menekankan pada aspek prilaku petani dan investasi dan analisisnya dengan Silmutaneous Equation

	Agricultural Sectoral		Econometric Model sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung
6.	Anthony Q Aboagye dan Kisan Gunjal, 2000 An Analysis of Short Run Response of Export and Domestic Agriculture in Sub Saharan Africa.	Meneliti tentang pembangunan sektor pertanian	Penelitian Ybs menekankan pada aspek ekspor pertanian dan analisisnya dengan The Profit Function Approach sedangkan meneliti faktor-yang mempengaruhi pembangunan pertanian menggunakan analisis jalur. Lokus penelitian di Prov. Lampung

Tabel 17. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kerangka Pemikiran

Secara makro, peran pertanian dalam pembangunan ekonomi dapat memberikan kontribusinya terhadap PDB dan ekspor serta penyerapan tenaga kerja. Fakta empiris kasus Indonesia menunjukkan bahwa seiring dengan proses industrialisasi, pangsa output agregat (PDB) dari sektor pertanian relatif menurun, sedangkan dari sektor industri dan sektor tersier meningkat. Selama periode 1997-2000 pangsa pertanian tidak lebih dari 20%, sebaliknya mulai Tahun 1993 kontribusi sektor industri telah melampaui sektor pertanian dan terakhir Tahun 2001 mencapai 26%. Meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang lebih baik pada saat krisis, namun secara umum laju pertumbuhan rata-rata sektor pertanian per tahun juga relatif kecil, di bawah 2%, dibandingkan sektor non pertanian yang tumbuh 8 sampai 9% (Tambunan, 2000).

Besaran kontribusi sektor pertanian dalam total kesempatan kerja menunjukkan trend perubahan jangka panjang yang menurun, sementara sektor industri mengalami kenaikan. Jika pada Tahun 1982, pertanian menyerap 54,7 tenaga kerja (industri 10,4%), maka pada Tahun 2000 kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja menurun menjadi 43%, sebaliknya industri naik menjadi 13%. Pengurangan tenaga kerja pertanian terjadi akibat transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke non pertanian dengan diikuti pengurangan jumlah absolutnya. Meskipun berkurang, namun karena proporsinya yang masih tinggi, jika dibandingkan dengan peran ekonominya, maka pola ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas sektor pertanian.

Menurut Kuznets dalam Sadono Sukirno (2006 : h. 143) membuat beberapa kesimpulan mengenai corak perubahan sumbangan berbagai sektor dalam pembangunan ekonomi.

1. Sumbangan sektor pertanian kepada produksi nasional telah menurun di dua belas dari tiga belas negara. Umumnya pada taraf permulaan pembangunan ekonomi, peranan sektor itu mendekati setengah dan adakalanya mencapai sampai hampir dua pertiga dari seluruh produksi nasional. Pada akhir masa observasi, peranan sektor pertanian di kebanyakan negara dalam menghasilkan produksi nasional hanya mencapai 20 persen atau kurang dan di beberapa negara peranannya lebih rendah dari 10 persen.
2. Di dua belas negara peranan sektor industri dalam menghasilkan produksi nasional meningkat.
3. Sumbangan sektor jasa dalam menciptakan pendapatan nasional tidak mengalami perubahan yang berarti dan perubahan itu tidak konsisten sifatnya.

Dengan demikian perubahan corak struktur ekonomi yang digambarkan di atas mempunyai arti bahwa (i) produksi sektor pertanian mengalami perkembangan lebih lambat ketimbang perkembangan produksi nasional ; sedangkan (ii) tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional dan (iii) tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa dalam produksi nasional berarti bahwa tingkat perkembangan sektor jasa adalah sama dengan tingkat perkembangan produksi nasional.

Dalam masalah pertanian, berdasarkan beberapa hasil penelitian dan studi lapangan, diantaranya : Laporan Kementerian Pertanian (beberapa tahun), Hasil lapaoran BPS (beberapa tahun), dan hasil penelitian beberapa peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan pertanian di Indonesia (termasuk Provinsi Lampung) bselama

Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009, secara umum sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas/petani
- 2) Harga sarana produksi pertanian yang tinggi sehingga menyulitkan petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang terjangkau.
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
- 4) Rendahnya produktivitas lahan dan mutu hasil pertanian belum sesuai standar SNI/Ekspor.
- 5) Lemahnya informasi dan akses pasar.
- 6) Kurangnya akses permodalan.
- 7) Belum berfungsinya kelembagaan petani.

Adapun masalah lain yang dihadapi oleh sektor pertanian antara lain adalah:

1. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian,
2. Menurunnya tersedianya air untuk mengairi tanaman, tidak sejalan dengan pembangunan irigasi dengan kebutuhan air oleh petani,
3. Masalah aksesibilitas dari sentra produksi ke lokasi pemasaran dan atau pelabuhan.
4. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan petugas penyuluh dan juga petani,
5. Adanya lahan yang subur dan masih kosong belum dimanfaatkan secara optimal,
6. Masalah bibit/ pembibitan dan pembinaan dari penyuluh kurang optimal,
7. Masih ada masalah pasca panen.

Sedangkan menurut Porter (1990) keunggulan kompetitif ditentukan oleh empat faktor pokok dan dua faktor penunjang. Empat faktor pokok tersebut adalah kondisi faktor produksi (*factor condition*), kondisi permintaan pasar (*demand condition*), industri-industri terkait dan industri-industri pendukung (*related and supporting industries*) serta strategi perusahaan, struktur dan persaingan (*firm strategy, structure and rivalry*). Sedangkan faktor penunjangnya adalah peluang (*change*) dan peranan pemerintah (*role of government*).

Keterbatasan lahan pertanian, khususnya untuk padi, memang sudah merupakan salah satu persoalan serius dalam kaitannya dengan ketahanan pangan di Indonesia selama ini. Menurut Herman Siregar dalam Tambunan (2009, h. 152), lahan sawah terancam semakin cepat berkurang walaupun sebenarnya lahan yang secara potensial dapat digunakan, misalnya, tetapi belum digunakan masih banyak. Alasannya, pencetakan sawah baru menemui banyak kendala, termasuk biayanya yang mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun tidak signifikan ketimbang luas areal yang terkonversi untuk keperluan non pertanian. Ironisnya, laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan terus meningkat dari tahun ke

tahun, sejalan dengan pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke perkotaan) dan industrialisasi.

Adapun dari aspek-aspek yang menjadi permasalahan pertanian tersebut di atas, penelitian akan menyoroti aspek yang menjadi kendala utama, di antaranya

1. Aspek Lahan / Tanah sebagai salah satu faktor produksi adalah merupakan pabriknya hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan dari mana hasil produksi keluar. Lahan/Tanah sebagai faktor produksi mempunyai kedudukan yang penting, hal ini bisa dibuktikan dengan besarnya balas jasa yang diterima oleh Lahan/Tanah dibandingkan faktor faktor produksi lainnya (Mubiarto,1979;1989). Balas jasa dari tanah dapat berupa inatura (bagi hasil) maupun sewa tanah berupa uang tunai (*rent*). Tinggi rendahnya sewa tanah tergantung dari :

- 1). kesuburan tanah (kemudian juga letak dari pasar) (*defferential rent*).
- 2). Adanya kelangkaan (*scarcity rent*)
- 3). kegunaan lahan/tanah untuk usaha tertentu. Naik turunnya sewa lahan/tanah tergantung naik turunnya harga komoditi, bukan sebaliknya.

2. Aspek Tenaga kerja dikatakan sebagai faktor produksi karena adanya balas jasa berupa upah tenaga kerja. Di masyarakat yang sedang berkembang seperti Indonesia, tenaga kerja melimpah sehingga upah tenaga kerja relatif murah. Sedang di negara maju jumlah tenaga kerja untuk usahatani relatif langka sehingga perlu efisiensi tenaga kerja

Beberapa syarat untuk menjamin efisiensi tenaga kerja yang maksimum :

a. persediaan tanah harus cukup, b. alat-alat pertanian, mesin-mesin dan tenaga kerja (power) harus cukup, c. Ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian harus cukup, d. Management usahatani harus unggul/baik.

Macam tenaga kerja berdasar penggunaannya : a. Tenaga kerja untuk usahatani pertanian rakyat. Tenaga kerja ini sebagian besar berasal dari keluarga petani sendiri, b. Tenaga kerja untuk perusahaan pertanian yang besar seperti perkebunan,kehutanan, peternakan dsb. Tenaga kerja ini sebagian besar berasal dari luar keluarga

3. Aspek kebijakan di sektor pertanian yang mendorong percepatan pembangunan, khususnya kebijaksanaan pertanian dapat berupa peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan dapat berupa kebijaksanaan-kebijaksanaan yang bersifat pengatur (*regulating policies*) dan pembangian pendapatan yang lebih adil dan merata (*distributive policies*). Beberapa kebijaksanaan yang spesifik yang penting diantaranya: a. Kebijaksanaan

harga; bertujuan untuk memberikan arah dan petunjuk pada jumlah produksi. Cara melaksanakan kebijaksanaan harga antara lain pemberian suatu penyangga (support) atas hasil-hasil pertanian supaya tidak terlalu merugikan petani atau langsung mengandung sejumlah subsidi tertentu bagi petani.

b. Kebijaksanaan Pemasaran ; Tujuannya untuk memperkuat daya saing petani. Cara kebijaksanaan pemasaran ini yaitu dengan cara memberi tekanan pada perubahan mata rantai pemasaran dari produsen ke konsumen dan memberikan jaminan harga minimum yang stabil pada petani. c. Kebijaksanaan Struktural ; tujuannya untuk memperbaiki struktur produksi misalnya luas pemilikan tanah, pengenalan dan penguasaan alat-alat pertanian yang baru dan perbaikan prasarana pertanian p[ada umumnya baik prasarana fisik maupun sosial ekonomi

4. Aspek Modal merupakan faktor penentu dalam pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu negara, perusahaan, ataupun masyarakat akan selalu berupaya untuk dapat mengakumulasi modalnya guna pelaksanaan aktivitas yang dilaksanakannya. Berdasarkan penggunaan uang, modal yaitu uang yang tidak dibelanjakan, jadi disimpan kemudian untuk diinvestasikan.

Kredit sebagai suatu alat untuk membantu penciptaan modal, adapun macam kredit : dapat berupa kredit investasi dan kredit modal kerja.

Pentingnya peranan kredit disebabkan oleh : a. kenyataan bahwa secara relatif memang modal merupakan faktor produksi non alami (bikin manusia) yang persediaannya masing sangat terbatas terutama di negara yang sedang berkembang. b. sangat kecil kemungkinan untuk memperluas tanah pertanian, c. persediaan tenaga kerja yang melimpah.

5. Aspek Peranan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting, terlebih-lebih untuk negara berkembang seperti Indonesia, dimana lembaga (*institution*), merupakan organisasi atau kaerah-kaedah baik formil maupun informil, yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa kelembagaan yang terkait dengan pembangunan pertanian diantaranya : a) Kementerian pertanian, b) pemerintah pusat dan pemerintah daerah, c), dinas-dinas terkait d) Lembaga-lembaga desa, e). Kelembagaan masyarakat, yang mengembangkan sikap gotong royong.

Tingkat Kesejahteraan petani berdasarkan data-data empirik dari pengalaman negara-negara dengan pendapatan rendah, memiliki pangsa pertanian di dalam total penyerapan tenaga kerja dan pembentukan PDB jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara dengan pendapatan tinggi seperti AS

dan Inggris (Todaro, 2000). Data Work Bank (1987) memberikan dukungan dugaan adanya korelasi yang kuat antara tingkat pendapatan per kapita dan perubahan struktur ekonomi dari pertanian ke industri. Negara-negara dengan pendapatan tinggi seperti Amerika, Kanada, Jepang, dan Eropa Barat, kontribusi pertaniannya jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara sedang berkembang.

Tujuan utama dari pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kesejahteraan ekonomi petani. Secara spesifik keberhasilan pembangunan pertanian adalah peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri.

Terkait dengan peran dan fungsinya tersebut, maka kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk: (1) mempertahankan dan jika mungkin meningkatkan pangsa pasar dari barang atau jasa yang dihasilkan dengan menekan biaya produksi serendah - rendahnya bahkan lebih rendah dari biaya produksi para pesaingnya (2) melindungi potensi ekonominya, menjaga dan mengamankan likuiditasnya dan menciptakan inovasi - inovasi usaha. Untuk menunjang tujuan tersebut maka aktivitas usaha (perusahaan) harus melakukan : (1) investasi yang mengarah pada penurunan biaya produksi, (2) investasi yang ditujukan pada pertumbuhan usaha, (3) menciptakan dasar yang memadai bagi modal sendiri, (4) pembentukan cadangan, (4) pembayaran deviden yang berorientasi pada kebutuhan pasar, (5) hubungan pasar yang lebih efisien dibandingkan para pesaing, (6) penyediaan barang dan jasa secara lebih efisien yang berorientasi pada kebutuhan para pelanggan, yaitu dengan harga, mutu, kondisi yang lebih baik daripada yang ditawarkan pesaing.

Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel lahan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel infrastruktur terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel teknologi dan SDM terhadap +7
4. pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung.
5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel energi terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung.
6. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel sarana produksi pertanian terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung.

Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 9 (Sembilan) bulan yang dimulai pada Bulan April 2011 hingga Bulan Desember 2011, meliputi tahap persiapan, tahap penjajagan, dan tahap penyusunan usulan penelitian kemudian tahap penulisan naskah hasil penelitian serta seminar hasil sampai dengan sidang terbuka. Adapun tempat penelitian dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang menjadi sentra pertanian bagi Provinsi Lampung (Kota Bandar Lampung Barat, Kota Metro, Kab. Lampung Barat, Kab. Tanggamus, Kab. Lampung Selatan, Kab. Lampung Timur, Kab. Lampung Tengah, Kab. Lampung Utara, Kab. Way Kanan, Kab. Tulang Bawang, Kab. Pesawaran, Kab. Pringsewu, Kab. Mesuji, Kab. Tulang Bawang).

Populasi, Sampel dan Sampling

Populasi merupakan keseluruhan kelompok atau orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih adalah seluruh masyarakat di sentra pertanian di Provinsi Lampung yang bekerja sebagai petani sebanyak 45.800 orang. Sampel (*sample*) adalah sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Teknik sampling dengan menggunakan *cluster random sampling* yakni teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi berdasarkan lokasi/daerah penelitian yang dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2009, h. 118). Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Issac and Michael untuk tingkat kesalahan 5% (Sugiono, 2008) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$s = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana : s = ukuran sampel
N = ukuran populasi, yaitu jumlah petani di daerah sentra pertanian di provinsi Lampung

X^2 = Nilai chi kuadrat dengan derajat kebebasan = 1, dan taraf kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$)
P = peluang untuk menerima bahwa suatu peristiwa dikatakan betul, dengan asumsi nilai = 0,5 (50%)
Q = peluang untuk menerima bahwa suatu peristiwa dikatakan salah, dengan asumsi nilai = 0,5 (50%)

$$s = \frac{x^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N-1) + x^2 \cdot P \cdot Q}$$

$$s = \frac{2,706 \times 45.800 \times 0,5 \times 0,5}{(0,05)^2 \cdot (45.800 - 1) + (2,706) \times (0,5) \times (0,5)}$$

$$s = \frac{30.442,5}{112,4975 + 0,6765}$$

$$s = 268,9884$$

(dibulatkan menjadi 270 responden)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagaimana mestinya (Sugiyono, 2009, h. 11).

1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. yang meliputi :

Definisi operasional masing-masing variabel sebagai berikut :

- Lahan
- Infrastruktur
- Teknologi dan SDM
- Energi.
- Sarana produksi pertanian
- Modal
- Kelembagaan dan kebijakan
- Pembangunan Ekonomi
- Kesejahteraan Ekonomi Petani

2. Operasionalisasi Variabel

Operasi variable meliputi sebagai berikut :

- lahan
- infrastruktur
- teknologi dan SDM
- Energi
- Sarana Produksi Pertanian
- Modal
- Kelembagaan dan Kebijakan
- Pembangunan Sektor Pertanian
- Kesejahteraan Ekonomi Petani

3. Instrumen Penelitian

Instrumen atau alat pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1). Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, dengan teknik yang digunakan sebagai Kuesioner dan Observasi,

2). Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pertanian, buku-buku literature, dokumentasi dan studi-studi terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam disertasi ini.

3). Teknik pengumpulan melalui kuesioner, dilakukan oleh para surveyor yang sebelumnya diberikan pelatihan, sehingga memahami butir – butir pertanyaan dalam kuesioner. Para surveyor disebar kewilayah

penelitian yang telah di tetapkan sebelumnya, selanjutnya menemui para petani yang telah terdata untuk mengisi kuesioner tersebut.

4. Desain Penelitian

Bidang penelitian ini adalah manajemen sumber daya manusia, khususnya sumber daya manusia dalam konteks manajerial perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode survey penjelasan (*explanatory survey method*), yaitu survey yang mencoba menghubungkan-hubungkan variabel dan menguji variabel-variabel yang diteliti. Penerapan metode penelitian survey dalam operasional, diperlukan suatu desain penelitian yang sesuai kondisi kedalaman penelitian yang akan dilakukan. Desain penelitian merupakan seluruh proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

mengadakan generalisasi serta inferensi statistik

Pelaporan hasil penelitian, termasuk proses penelitian, diskusi serta interpretasi data, generalisasi, kekurangan-kekurangandalam penemuan, serta menganjurkan beberapa saran-saran dan kerja penelitian yang akan datang. Mengacu pada proses tersebut, maka desain penelitian dapat disajikan dalam Gambar 3.1.

5. Pengujian Instrumen Penelitian.

Adapun teknik analisis statistik yang dilakukan dalam pengujian data adalah sebagai berikut :

a. Uji Validitas Instrumen

b. *Accuracy of The Estimate of The Parameters.*

Model penelitian ini menghasilkan estimator koefisien jalur yang akurat atau tidak bias dan

Validitas menunjukkan sejauhmana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995, h. 122). Uji validitas dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$r = \frac{N (\sum XY) - (\sum X \sum Y)}{[\sum X^2 - (\sum X)^2] [\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}$$

b. Uji Reliabilitas Instrumen.

Reliabilitas (keandalan) suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi dimana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai ketepatan sebuah pengukuran. (Sekaran, 2006, h. 40). Keandalan konsisten antar-item merupakan pengujian konsistensi jawaban responden atas semua item yang diukur. Tes keandalan antar-item menggunakan koefisien Alfa Cronbach. Semakin tinggi koefisien, semakin baik instrumen pengukuran. (Apabila nilai r_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (0,700).

c. Uji Normalitas.

Sebelum data diolah terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu data mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk mengetahui apakah data tersebut mengikuti sebaran normal dapat dilakukan dengan berbagai metode diantaranya adalah metode *Kolgomorov Smirnov* dan metode *Shapiro Wilk*.

6. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model penelitian dimaksudkan untuk mengetahui bahwa model yang menjadi kerangka pemikiran atau sebagai konstruksi teoritis penelitian yang dirumuskan dalam bentuk diagram dan atau persamaan matematik sudah fit dengan data. Artinya, bahwa model yang digunakan sudah mampu mengestimasi semua parameter model yang menjadi variabel penelitian yang dituangkan ke dalam hipotesis penelitian (Wirasmita, 2007). Adapun hasil uji kelayakan model dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. *Theoretical Plausibility.*

Model penelitian ini memperlihatkan bahwa hasil uji telah sesuai dengan ekspektasinya dari teori manajemen SDM menjadi dasar pemikirannya. signifikan. Asumsi analisis terpenuhi dan probabilitas kesalahan statistik dari model sangat rendah ($p\text{-value} = 0,00$ atau lebih kecil dari lima persen).

c. *Explanatory ability.*

Model penelitian ini memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjelaskan hubungan antar fenomena variabel manajemen yang dikaji. *Standard error* (SE) lebih kecil daripada ½ kali nilai mutlak koefisien jalur ($SE < \frac{1}{2} b_{ij}$).

Hubungan dan keterkaitan antar variabel	Pra estimasi	Pasca estimasi	Kesesuaian
Hubungan dan keterkaitan variabel	+	+	Sesuai
Pengaruh antar Variabel	+	+	Sesuai

d. Forecasting Ability.

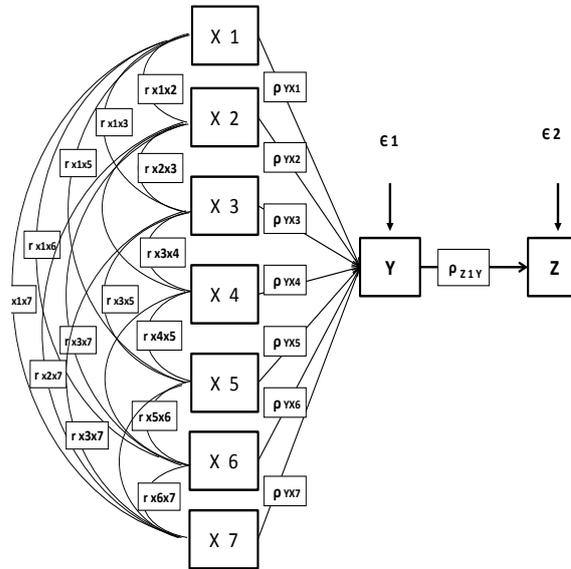
Model penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang tinggi atas perilaku variabel terikat sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya koefisien determinasi model yang mendekati atau melebihi 50%.

7. Analisis jalur (Path Analysis)

Mengingat di antara variabel bebas terdapat hubungan diantara variabel (adanya koefisien

korelasi), maka analisis yang digunakan adalah analisis jalur. Dalam analisis jalur dapat diketahui besaran pengaruh langsung maupun tidak langsung dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis jalur (*path analysis*). Untuk lebih jelasnya diagram model analisis jalur (*Path Analysis*) dapat di lukiskan sebagai berikut :



Gambar 3.2. Diagram Model Penelitian

Secara matematik analisis jalur (*Path Analysis*) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \rho_{YX1} X1 + \rho_{YX2} X2 + \rho_{YX3} X3 + \rho_{YX4} X4 + \rho_{YX5} X5 + \rho_{YX6} X6 + \rho_{YX7} X7 + \epsilon 1$$

$$Z = \rho_{Z1Y} Y + \epsilon 2$$

Dimana :

- X₁ = Lahan
- X₂ = Infrastruktur
- X₃ = Teknologi dan SDM
- X₄ = Energi
- X₅ = Sarana produksi pertanian
- X₆ = Modal
- X₇ = Kelembagaan dan Kebijakan.

- Y = Pertumbuhan Ekonomi
- Z = Kesejahteraan Ekonomi Petani
- ε = Variabel lain diluar model atau variabel residu.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R²) atau Koefisien Penentu (KP) digunakan untuk mengetahui berapa besarnya kontribusi X terhadap nilai Y, atau untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R²) bermanfaat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Mudrajad Kuncoro, 2004, h. 84). Formula koefisien

determinasi (R²) juga dapat dihitung $R^2 = (TSS - SSE) / TSS = SSR / TSS$

Dimana :

- TSS = total sum of squares
- SSE = sum of squares error
- SSR = sum of squares due to regression

8. Pengujian Hipotesis

1). Untuk menguji hipotesis tentang adanya Pengaruh secara simultan dari variabel bebas (X 1, X 2, X3, X4, X5, X6, X7) terhadap variabel terikat Y menggunakan Uji statistik F, dimana pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. (Mudrajad Kuncoro, 2004, h. 82). Pengujian hipotesa secara bersamaan (Pengujian Simultan),

H₀ : $\rho_{YX1} = \rho_{YX2} = \rho_{YX3} = \rho_{YX4} = \rho_{YX5} = \rho_{YX6} = \rho_{YX7} = 0$: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari Faktor-faktor independen X terhadap faktor dependen Y

H₁ : $\rho_{YX1} \neq \rho_{YX2} \neq \rho_{YX3} \neq \rho_{YX4} \neq \rho_{YX5} \neq \rho_{YX6} \neq \rho_{YX7}$: Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersamaan dari faktor-faktor

$\neq 0$ independen X terhadap faktor-faktor dependen Y

n = jumlah observasi
k = jumlah parameter dalam model
 S^2 = varians

Adapun kriteria uji : tolak hipotesa (H_0), jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dimana Nilai statistik F dihitung dari formula sebagai berikut :

$$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR / k}{SSE / (n - k)}$$

Dimana :

SSR = *sum of squares due to regression* SSE = *sum of squares error*

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter dalam model

MSR = *mean squares due to regression*

MSE = *mean of squares due to error*

2). Pengujian hipotesa secara masing-masing untuk variabel X terhadap variabel Y (Pengujian Parsial)

$H_0 : \rho_{YX_i} = 0$: Tidak terdapat pengaruh masing – masing dari Variabel bebas (X_i) terhadap Variabel terikat (Y)

$H_1 : \rho_{YX_i} \neq 0$: Terdapat pengaruh masing – masing dari Variabel bebas (X_i) terhadap Variabel terikat (Y)

dimana $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$

Adapun kriteria uji : tolak hipotesa (H_0), jika

$t_{hitung} > t_{tabel}$

3). Pengujian hipotesa : Tidak terdapat pengaruh dari Variabel Y terhadap variabel Z secara masing-masing (Pengujian Parsial),

$H_0 : \rho_{ZY} = 0$

$H_1 : \rho_{ZY} \neq 0$: Terdapat pengaruh dari Variabel Y terhadap variabel Z

Adapun kriteria uji : tolak hipotesa (H_0), jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, dimana nilai Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat (Mudrajad Kuncoro, 2004, h. 81). Statistik t dihitung dari formula sebagai berikut :

$$S^2 = \frac{SSE}{(n - k)}$$

Dimana :

SSE = *sum of squares error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah, Kondisi, dan Gambaran Umum Provinsi Lampung

Lampung adalah sebuah provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia. Di sebelah utara berbatasan dengan Bengkulu dan Sumatera Selatan. Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Teluk betung memiliki wilayah yang relatif luas, dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur - Barat berada antara : $103^\circ 40'$ - $105^\circ 50'$ Bujur Timur Utara - Selatan berada antara : $6^\circ 45'$ - $3^\circ 45'$ Lintang Selatan

Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan.

Demografi, Ekonomi dan Potensi Daerah

Masyarakat pesisir lampung kebanyakan nelayan, dan bercocok tanam. sedangkan masyarakat tengah kebanyakan berkebun lada, kopi, cengkeh, kayu manis dll. Selanjutnya Lampung fokus pada pengembangan lahan bagi perkebunan besar seperti kelapa sawit, karet, padi, singkong, kakao, lada hitam, kopi, jagung, tebu dll. Dan di beberapa daerah pesisir, komoditas perikanan seperti tambak udang lebih menonjol, bahkan untuk tingkat nasional dan internasional. Selain hasil bumi Lampung juga merupakan kota pelabuhan (liverpoolnya sumatra) karena lampung adalah pintu gerbang untuk masuk ke pulau sumatra. dari hasil bumi yang melimpah tumbuhlah banyak industri-industri seperti di daerah pesisir panjang, daerah natar, tanjung bintang, bandar jaya dll

Luas wilayah Provinsi Lampung tercatat 3.528.835 Ha. Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten terluas (495.040 Ha), merupakan kabupaten terluas (495.040 Ha), sedangkan wilayah terkecil adalah Kota Metro (6.179 Ha). Kawasan bagian Barat Provinsi Lampung merupakan daerah pegunungan sebagai rangkaian dari Bukit Barisan. Tercatat tiga buah gunung yang tingginya lebih dari 2000 m. dari permukaan laut, Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Lampung memiliki lebih dari 150 pulau baik pulau besar maupun pulau kecil. Pulau-pulau tersebut merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan

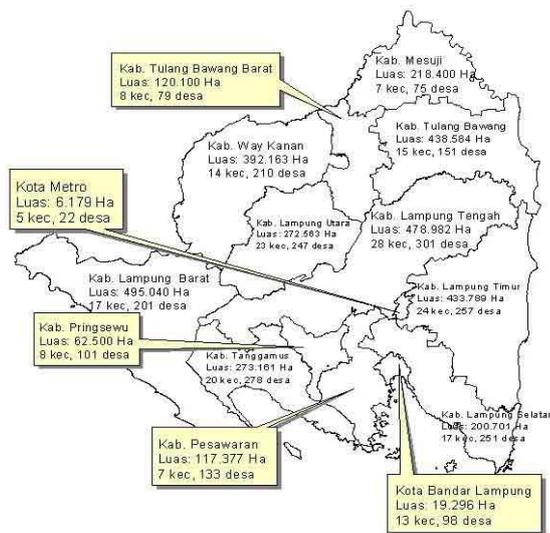
kesejahteraan masyarakat Lampung. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Lampung memiliki lima daerah River Basin yaitu River Basin Tulang Bawang, River Basin Mesuji, River Basin Seputih, River Basin Sekampung dan River Basin Semangka. Sungai dan anak sungai tersebut merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengairan bagi sektor pertanian dan dijaga kelestariannya.

Pemerintahan dan Kependudukan

Sejak Tahun 1997 wilayah provinsi Lampung dimekarkan menjadi 7 Kabupaten /kota, kemudian dengan diundangkannya UU No.12 Tahun 1999 dimekarkan lagi menjadi 10 kabupaten/kota. Berdasarkan UU RI No. 33 Tahun 2007 terbentuklah

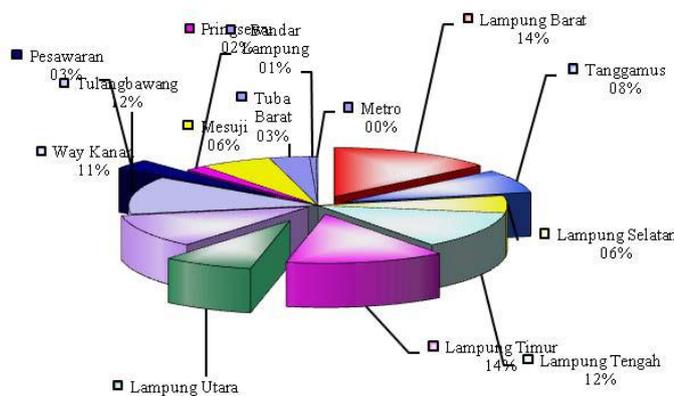
Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Dengan demikian Provinsi Lampung terdiri dari 9 kabupaten dan 2 kota. Tahun 2009 berubah menjadi 11 Kabupaten dan 2 Kota. Tahun 2009 wilayah administrasi desa/kelurahan di Provinsi Lampung mengalami penambahan menjadi 2.404 desa/kelurahan, dimana tahun 2008 berjumlah 2.339 desa/kelurahan.

Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tertuang pada PP.41/2007. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada Gambar dan tabel di bawah ini :



Gambar 2. Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2009

Adapun presentasi luas wilayah untuk masing-masing Kota dan Kabupaten di Provinsi Lampung dapat di jelaskan pada gambar 4.2. di bawah ini :



Gambar 3. Luas Wilayah Provinsi Lampung menurut Kabupaten dan Kota Tahun 2009

Sedangkan perincian luas wilayah, jumlah Kecamatan dan jumlah Desa/Kelurahan untuk masing-masing Kota dan Kabupaten dapat di jelaskan pada tabel 4.1. di bawah ini :

Tabel 19. Provinsi Lampung menurut Kabupaten/Kota TH 2009 / (Ha)

Kabupaten / Kota	Luas	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1. Kab. Lampung Barat	495.040	17	201
2. Kab. Tanggamus	273.161	20	278
3. Kab. Lampung Selatan	200.701	17	251
4. Kab. Lampung Timur	433.789	24	257
5. Kab.Lampung Tengah	478.982	28	301
6. Kab.Lampung Utara	272.563	23	247
7. Kab.Way Kanan	392.163	14	210
8. Kab.Tulang Bawang	438.584	15	151
9. Kab.Pesawaran	117.377	7	133
10. Kab. Pringsewu	62.500	8	101
11. Kab.Mesuji	218.400	7	75
12. Kab.Tulang Bawang Barat	120.100	8	79
13. Kota Bandar Lampung	19.296	13	98
14. Kota Metro	6.179	5	22

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 4.1. tersebut di atas, kabupaten yang terluas adalah Kabupaten Lampung Barat dan terluas yang keduanya Lampung Tengah. Adapun Kota terluasnya adalah Kota Bandar Lampung.

Mengingat Provinsi Lampung merupakan salah satu Provinsi yang mengutamakan pengembangan

sektor pertanian, maka optimalisasi lahan yang tersedia menjadi pusat perhatian dalam pengembangan program pembangunannya. Adapun rincian pemanfaatan lahan dapat di jelaskan pada tabel 4.2. di bawah ini :

Tabel 20. Luas Lahan Provinsi Lampung menurut Penggunaan Tahun 2009 (Ha)

Kabupaten / Kota	Sawah	Pekarangan	Tegal/Kebun/ Ladang/Huma	Sementara Tidak Di usahakan	Lainnya	Jumlah
12. Kab. Lampung Barat	19.893	10.135	48.903	13.667	402.442	495.040
13. Kab. Tanggamus	31.636	20.225	58.550	7.700	217.550	335.661
14. Kab. Lampung Selatan	44.847	18.104	82.811	480	54.459	200.701
15. Kab. Lampung Timur	58.969	28.548	91.599	781	253.892	433.789

16. Kab.Lampung Tengah	72.692	42.839	129.109	2.106	232.236	478.982
17. Kab.Lampung Utara	17.291	36.289	97.627	1.133	120.223	272.563
18. Kab.Way Kanan	18.329	26.669	104.792	19.207	223.166	392.163
19. Kab.Tulang Bawang	166.564	39.071	144.475	38.507	388.467	777.084
20. Kab.Pesawaran	13.121	7.364	30.382	80	66.430	117.377
21. Kota Bandar Lampung	1.024	8.611	2.912	860	5.889	19.296
22. Kota Metro	3.013	1.531	202	0	1.433	6.179
Jumlah	447.379	239.386	791.362	84.521	1.966.187	3.528.835

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 4.2 tersebut di atas, maka lahan persawahan merupakan terbesar, yaitu sebesar 447.379. dengan perincian lahan persawahan yang terluasnya berada di Kabupaten Tulang Bawang seluas 166.564, terluas kedua yaitu Kabupaten Lampung Tengah seluas 72.692, Kabupaten terluas ketiga yaitu Lampung Timur seluas 58.969, Kabupaten terluas keempat Kab. Lampung Selatan seluas 44.847, sedang lahan sawah yang terkecil adalah Kota Bandar Lampung seluas 1.024.

Pertanian

Pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas yaitu mencakup pertanian tanaman bahan makanan, tanaman obat dan hias, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Survei pertanian yang dilakukan oleh BPS dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan juga menghasilkan data

luas panen dan produksi tanaman sayuran, buah-buahan, obat dan tanaman hias.

Produksi komoditas perkebunan terbesar adalah tebu yang mencapai 798.885 ton, dimana produksi tebu terbesar dihasilkan oleh perkebunan swasta (87,55 persen). Hal ini berkaitan dengan adanya industri gula di Provinsi Lampung, yang sekaligus mengusahakan perkebunan tebu. Selain tebu, kopi merupakan komoditas andalan di Provinsi Lampung, hal ini diperkuat dengan besarnya produksi kopi. Tahun 2009 mencapai 145.191 ton, dimana Pertanian Kabupaten Lampung Barat merupakan penghasil kopi terbesar yaitu sekitar 42,15 persen dari total produksi kopi Provinsi Lampung. Adapun rincian dari hasil pertanian dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel : 21. Luas Panen Padi dan Palawija di Provinsi Lampung Tahun 2000 - 2009 (dalam Hektar)

Tahun	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Tanah	Kedelai	Kacang Hijau
2000	496,650	378,497	257,506	4,485	9,163	24,055	6,258
2001	501,118	378,251	316,979	4,380	12,250	12,176	27,186
2002	475,461	320,008	295,156	4,113	8,414	6,020	5,851
2003	472,635	330,852	298,989	4,267	10,921	4,231	6,005
2004	495,519	364,842	266,586	4,745	10,464	5,139	5,643
2005	496,538	411,629	252,984	4,617	10,857	4,110	5,653
2006	494,102	332,640	283,430	4,400	10,127	3,247	5,022
2007	524,955	369,971	316,806	4,813	10,698	3,008	5,035

2008	506,547	387,549	318,969	4,953	10,316	5,658	4,492
2009	570,417	434,542	309,047	4,626	8,667	13,518	4,325

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 4.3 tersebut di atas, maka lahan padi merupakan lahan terbesar, yaitu sebesar 570,417 HA, yang dari tahun ketahun terjadi peningkatan luas lahan:

Tabel : 22. Produksi Tanaman Padi per Kwartal per Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Th 2009 (Ton)

Kabupaten / Kota	Padi Sawah	Padi Ladang	Jumlah
1. Kab. Lampung Barat	153.144	6.339	159.483
2. Kab. Tanggamus	306.716	6.992	313.708
3. Kab. Lampung Selatan	338.988	26.062	365.050
4. Kab. Lampung Timur	259.928	18.020	277.948
5. Kab.Lampung Tengah	550.253	58.041	608.294
6. Kab.Lampung Utara	108.471	30.906	139.377
7. Kab.Way Kanan	135,751	24,146	159,89
8. Kab.Tulang Bawang	324,412	11,931	336,343
9. Kab.Pesawaran	119,971	3,830	123,801
10.Kota Bandar Lampung	9,039	181	9,220
11.Kota Metro	23,048	82	23,130
Jumlah	2,487,314	186,530	2,673,844

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut di atas, maka lahan padi persawahan jauh lebih besar dari lahan padi ladang. Adapun daerah yang terluas adalah

Kabupaten Lampung Tengah seluas 550.253 HA. Dengan demikian peluang peningkatan produksi padi di Lampung semakin meningkat.

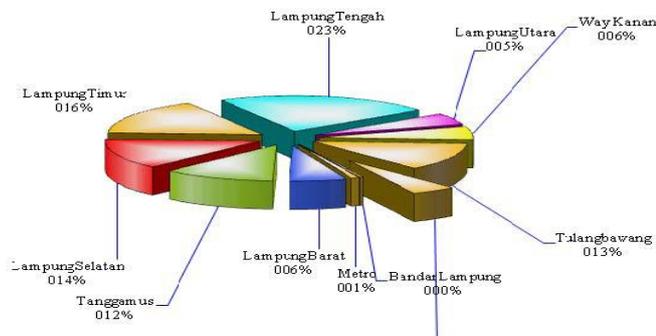
Tabel : 22. Penduduk Provinsi Lampung Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Kabupaten/kota dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2008

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	Jumlah
1. Kab. Lampung Barat	167,109	564	17,223	2,349	5,602	192,847
2. Kab. Tanggamus	249,670	22,842	43,338	8,399	21,197	345,446
3. Kab. Lampung Selatan	192,969	38,179	55,221	13,088	32,381	331,838
4. Kab. Lampung Timur	245,370	40,711	70,877	8,942	28,664	394,564
5. Kab.Lampung Tengah	306,413	33,843	77,022	9,916	36,287	463,481
6. Kab.Lampung Utara	122,648	7,207	32,085	5,496	17,202	184,638
7. Kab.Way Kanan	116,796	5,477	15,678	2,121	8,638	148,710
8. Kab.Tulang Bawang	179,637	18,673	44,876	6,301	17,751	267,238
9. Kab.Pesawaran	88,259	9,063	30,981	3,245	13,683	145,231
10.Kota Bandar Lampung	4,553	7,682	104,115	27,655	49,363	193,368
11.Kota Metro	6,178	2,601	15,338	2,651	6,653	33,421
Jumlah	1,679,602	186,842,	506,754	90,163	237,421	2,700,782

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Catatan : 1. Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan 2. Industri Pengolahan 3. Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel 4. Jasa Kemasyarakatan 5. Lainnya (Pertambangan dan Penggalian, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan,Angkutan, Pergudangan dan

Komunikasi, Keuangan, Usaha Persewaan Bangunan,Tanah dan Jasa PerusahaanAdapun besaran presentase distribusi dari produksi padi untuk masing - masing kota dan kabupaten di Provinsi Lampung, dapat dijelaskan pada Gambar 4.3 di bawah ini :



Gambar 4.3. Distribusi Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009

Gambar 4. Distribusi Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2009

Ekonomi dan PDRB

Mengingat Provinsi Lampung sebagai provinsi yang berdekatan dengan Pulau Jawa dan merupakan Provinsi penghubung antara Pulau Jawa dengan Provinsi-provinsi lainnya di Pulau Sumatera, maka pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonominya cukup berkembang dengan baik. Sebagai gambaran dari keberhasilan pembangunan tersebut, salah satunya dapat di representasikan oleh besaran pengeluaran dan konsumsi penduduk Provinsi Lampung, berdasarkan hasil pengolahan Survei Sosial Ekonomi (Susenas) panel Maret 2009. Pengeluaran rata-rata perkapita sebulan untuk makanan 183.147 rupiah dan untuk bukan makanan 167.708 rupiah. Semakin tinggi golongan pengeluaran, terutama pengeluaran untuk bukan makanan, maka ini mengartikan bahwa semakin tinggi pengeluaran perkapita, kebutuhan bukan makanan semakin meningkat. Berdasarkan tipe daerah dapat juga diketahui bahwa pengeluaran perkapita daerah kota lebih banyak digunakan untuk pengeluaran bukan makanan.

Berdasarkan perhitungan PDRB Propinsi Lampung dengan tahun dasar 2000, laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 Laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Lampung mengalami kenaikan 5,07 persen. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 5,26 persen. Sebagian besar sektor ekonomi di Propinsi Lampung tahun 2009 mengalami pertumbuhan positif kecuali sektor

pertambangan dan penggalian yang mengalami pertumbuhan negatif - 9,21 persen. Seperti tahun-tahun sebelumnya, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan tertinggi di propinsi lampung hingga 12,91 persen, diikuti oleh sektor angkutan dan telekomunikasi 11,25 persen. Sektor perdagangan, restoran dan hotel menempati posisi ketiga dengan laju pertumbuhan 6,95 persen.

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Propinsi Lampung tahun 2009, sumbangan sektor ini terhadap PDRB 34.381,86 milyar rupiah (38,93 persen) diikuti sektor industri pengolahan 12.423,00 milyar rupiah (14,07 persen). Sedangkan Pendapatan Regional 560 sektor perdagangan, restoran dan hotel memberikan sumbangan 12.046,28 milyar rupiah (13,64 persen) Dilihat dari sisi penggunaan, sebagian besar PDRB Provinsi Lampung selama kurun waktu 2007-2009 digunakan untuk konsumsi rumah tangga dan perdagangan luar negeri. Pada tahun 2009 konsumsi rumah tangga propinsi Lampung 51.414,37 milyar rupiah atau menyerap 58,21 persen total PDRB, diikuti oleh ekspor dan impor masing-masing 41,64 persen dan 29,63 persen dari total PDRB. Selama periode 2006 - 2009, PDRB Perkapita Provinsi Lampung atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2006 PDRB.

Adapun perkembangan perekonomian daerah dan kerberhasilan peningkatan PDRB Provinsi Lampung untuk tiap lapangan usaha dapat di jelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 23. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2007 - 2009 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2007	2008*)	2009**)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan	2 2.732.966	2 8.773.832	34.381.861
2. Pertambangan dan Penggalian	2 .190.112	2 .306.687	1.780.042
3. Industri Pengolahan	8 .313.988	9 .726.559	12.423.000
4. Listrik dan Air Bersih /	4 01.210	4 41.550	412.718
5. Bangunan	3 .079.057	3 .278.268	3.742.874
6. Perdagangan, Restoran dan Hotel	8 .714.733	1 0.158.964	12.046.283
7. Angkutan dan Komunikasi	5 .094.877	6 .660.142	8.797.657
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3 .665.182	4 .772.937	5.712.663
9. Jasa-jasa	6 .729.840	8 .371.659	9.025.390
Produk Domestik Regional Bruto /	6 0.921.966	7 4.490.599	88.322.488

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel : 24. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha di Provinsi Lampung Tahun 2007 - 2009 (persen)

Lapangan Usaha	2007	2008*)	2009**)
1.Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan	5,52	2,99	2,46
2.Pertambangan dan Penggalian	-3,02	-1,48	-9,21
3.Industri Pengolahan	6,33	5,71	5,88
4.Listrik dan Air Bersih /	10,18	1,84	1,79
5.Bangunan	5,32	4,68	4,87
6.Perdagangan, Restoran dan	4,46	7,00	6,95

Hotel			
7. Angkutan dan Komunikasi	7,94	8,81	11,25
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	15,06	13,85	12,91
9. Jasa-jasa	4,60	5,40	5,59
Produk Domestik Regional Bruto /	5,94	5,26	5,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Tabel 25. Distribusi Persentase Terhadap Total PDRB Seluruh Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Lampung Tahun 2006 – 2009

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008*)	2009**)
1. Kab. Lampung Barat	3,23	3,28	3,19	3,00
2. Kab. Tanggamus	8,34	8,27	8,05	4,95
3. Kab. Lampung Selatan	15,12	14,95	10,27	10,82
4. Kab. Lampung Timur	13,28	12,43	11,59	10,65
5. Kab. Lampung Tengah	16,01	15,97	15,72	16,20
6. Kab. Lampung Utara	8,20	8,36	8,18	8,45
7. Kab. Way Kanan	3,50	3,53	3,67	2,88
8. Kab. Tulang Bawang	13,45	13,75	14,35	6,92
9. Kab. Pesawaran	x	x	4,70	4,90
10. Kab. Pringsewu	x	x	x	2,98
11. Kab. Tulang Bawang Barat	x	x	x	3,38
12. Kab. Mesuji	x	x	x	3,37

13. Kota Bandar Lampung	17,49	18,15	19,04	20,28
14. Kota Metro	1,38	1,31	1,23	1,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Pengujian Data dan Analisis Data

1. Pengolahan dan Pengujian Data.

1). Pengujian Validitas

Dalam pengujian validitas dari setiap item (butir) pertanyaan dalam kuesioner, artinya mengkorelasikan skor setiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Menurut Sugiyono (1999:46), item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total serta korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Kriteria yang digunakan untuk uji validitas butir menggunakan rujukan r_{tabel}

dengan $\alpha = 0,05$, jika r_{hitung} lebih besar dari atau sama dengan r_{tabel} , maka butir instrumen dianggap valid. Sebaliknya jika r_{hitung} lebih kecil dari pada r_{tabel} maka butir instrumen dianggap tidak valid dan selanjutnya didrop atau tidak digunakan. Adapun besarnya r_{tabel} untuk sampel sebesar 270 responden adalah sebesar 0,300.

Adapun hasil perhitungan lengkap uji validitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 26. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X1

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 1.1	0,345	Valid	X 1.8.	0,545	Valid
X 1.2	0,395	Valid	X 1.9.	0,549	Valid
X 1.3	0,544	Valid	X 1.10.	0,502	Valid
X 1.4	0,496	valid	X 1.11.	0,499	Valid
X 1.5	0,551	Valid	X 1.12.	0,327	Valid
X 1.6	0,546	Valid	X 1.13.	0,545	Valid
X 1.7	0,564	Valid			

Tabel 27. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X2

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 2.1	0,406	Valid	X 2.7.	0,357	Valid
X 2.2	0,423	Valid	X 2.8.	0,378	Valid
X 2.3	0,319	Valid	X 2.9.	0,377	Valid
X 2.4	0,390	Valid	X 2.10.	0,321	Valid
X 2.5	0,536	Valid	X 2.11.	0,315	Valid
X 2.6	0,327	Valid			

Tabel 28. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X3

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 3.1	0,536	Valid	X 3.7	0,715	Valid
X 3.2	0,491	Valid	X 3.8	0,658	Valid
X 3.3	0,563	Valid	X 3.9	0,604	Valid
X 3.4	0,648	Valid	X 3.10	0,623	Valid
X 3.5	0,657	Valid	X 3.11	0,540	Valid
X 3.6	0,679	Valid			

Tabel 29. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X4

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 4.1	0,351	Valid	X 4.6	0,386	Valid
X 4.2	0,369	Valid	X 4.7	0,416	Valid
X 4.3	0,468	Valid	X 4.8	0,306	Valid
X 4.4	0,437	Valid	X 4.9	0,393	Valid
X 4.5	0,474	Valid	X 1.10	0,343	Valid

Tabel 30. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X5

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 5.1	0,363	Valid	X 5.7	0,535	Valid
X 5.2	0,415	Valid	X 5.8	0,525	Valid
X 5.3	0,556	Valid	X 5.9	0,536	Valid
X 5.4	0,558	Valid	X 5.10	0,584	Valid
X 5.5	0,557	Valid	X 5.11	0,367	Valid
X 5.6	0,542	Valid	X 5.12	0,346	Valid

Tabel 31. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X6

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 6.1	0,303	Valid	X 6.6	0,513	Valid
X 6.2	0,303	Valid	X 6.7	0,525	Valid
X 6.3	0,393	Valid	X 6.8	0,327	Valid
X 6.4	0,367	Valid	X 6.9	0,443	Valid
X 6.5	0,481	Valid	X 6.10	0,372	Valid

Tabel 32. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner X7.

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
X 7.1	0,324	Valid	X 7.6	0,484	Valid
X 7.2	0,396	Valid	X 7.7	0,209	Valid
X 7.3	0,426	Valid	X 7.8	0,379	Valid
X 7.4	0,476	Valid	X 7.9	0,362	Valid
X 7.5	0,363	Valid	X 7.10	0,385	Valid

Tabel 33. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner Y

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
Y 1	0,347	Valid	Y 7	.0,599	Valid
Y 2	0,395	Valid	Y 8	.0,621	Valid
Y 3	0,529	Valid	Y 9	0,613	Valid
Y 4	0,524	Valid	Y 10	0,601	Valid
Y 5	.0,605	Valid	Y 11	0,451	Valid
Y 6	0,562	Valid			

Tabel 34. Pengujian Validitas item pertanyaan kuesioner Z

Item Pernyataan	Validitas	Keterangan	Item Pernyataan	Validitas	Keterangan
Z 1.1	0,614	Valid	Z 1.7	0,655	Valid
Z 1.2	0,646	Valid	Z 1.8	0,641	Valid
Z 1.3	0,586	Valid	Z 1.9	0,605	Valid
Z 1.4	0,666	Valid	Z 1.10	0,700	Valid
Z 1.5	0,599	Valid	Z 1.11	0,704	Valid
Z 1.6	0,599	Valid			

Berdasarkan hasil pengujian validitas seperti yang dijelaskan pada tabel 4.3. sampai dengan tabel 4.11 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari

seluruh item pertanyaan dari setiap variabel penelitian semuanya dinyatakan valid, oleh karena itu dalam analisis data, seluruh item pertanyaan di analisis.

2). Pengujian Reliabilitas

Hasil Pengolahan data dengan menggunakan soft ware SPSS versi 17 di peroleh hasil pengujian reliabilitas seluruh variabel berikut :

Tabel 35. Pengujian realibilitas seluruh variabel

Variabel	Perhitungan nilai r		Kesimpulan
	r tabel	r hitung	
Lahan, (X ₁)	0,754	0,700	Reliabel
Infrastruktur, (X ₂)	0,793	0,700	Reliabel
Teknologi dan SDM, (X ₃)	0,807	0,700	Reliabel
Energi, (X ₄)	0,774	0,700	Reliabel
Sarana produksi pertanian, (X ₅)	0,707	0,700	Reliabel
Modal, (X ₆)	0,726	0,700	Reliabel
Kelembagaan dab kebijakan (X ₇)	0,875	0,700	Reliabel
Pembangunan sektor pertanian (Y)	0,731	0,700	Reliabel
Kesejahteraan ekonomi petani (Z)	0,831	0,700	Reliabel

Pada Tabel 4.18. memperlihatkan bahwa besaran r hitung nilainya lebih besar dari nilai r tabel (r hitung > 0,700), dengan demikian seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel.

2. Analisis Data

1). Analisis deskriptif jawaban responden

Analisis terhadap hasil pengisian kuesioner dari 270 responden, data yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut variabel

bebas maupun variabel terikat, dapat dijelaskan dalam distribusi frekuensi dari masing-masing pertanyaan dari kuesioner. Adapun distribusi frekuensi tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 36. Nilai rata – rata Jawaban Responden

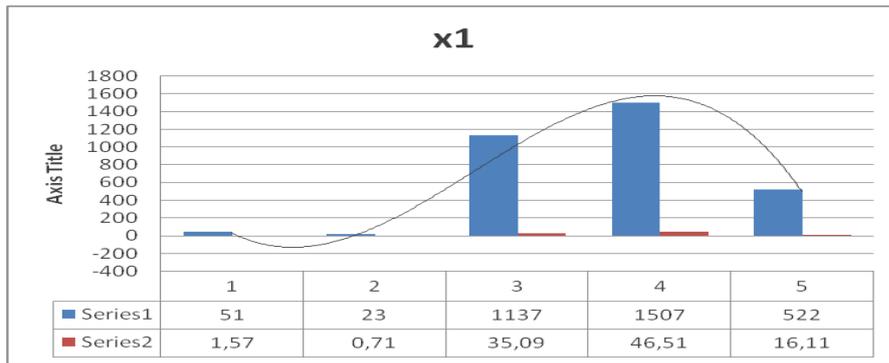
Variabel	Nilai Rata-Rata Jawaban Responden	Standar Deviasi
X 1	3.7488	0,45519
X 2	3.6731	0,31565
X 3	3.8845	0,53675
X 4	3.6441	0,38284
X 5	3.7034	0,43043
X 6	3.7004	0,36760
X 7	3.6189	0,32340
Y	3.7434	0,55791
Z 1	3.7225	0,31889

Adapun tanggapan responden terhadap masing-masing pernyataan dari setiap variabel dalam kuesioner akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

a). Lahan Pertanian (X₁)

Variabel lahan terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu luas lahan, status kepemilikan lahan, tingkat

kesuburan lahan. Setiap dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan. dalam kuesioner. Penjelasan variabel lahan pertanian (X₁) dapat dijelaskan pada diagram berikut:



Nilai Rata - rata 3.7488 Standar Deviasi = 0,45519

Gambar 5. Analisis deskriptif untuk lahan

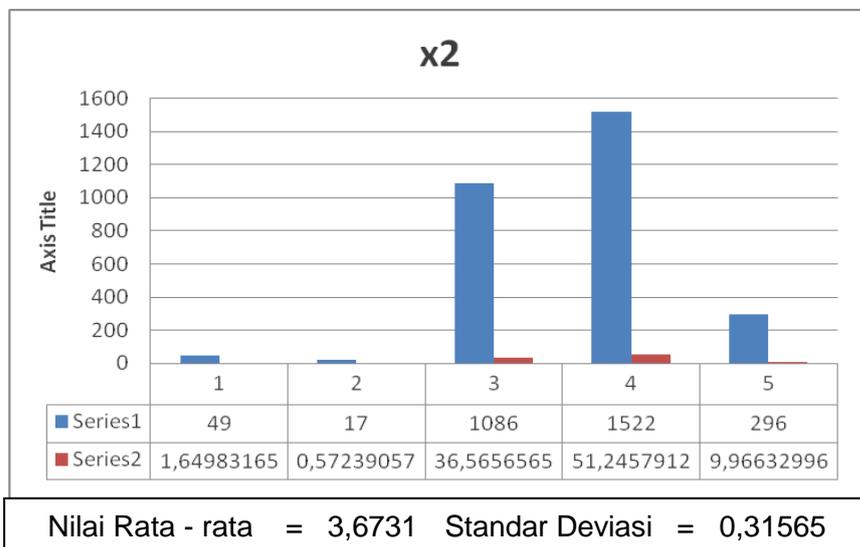
Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 16,11 persen, setuju sebanyak 46,51 persen, cukup setuju sebanyak 35,09 persen, tidak setuju sebanyak 0,71 persen, sedangkan yang menjawab

sangat tidak setuju 1,57 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3.7488 dan standar deviasi sebesar 0,45519 dengan demikian X_1 dalam kriteria penilaian baik.

b). Infrastruktur, (X_2)

Variabel infrastruktur yang mendukung pertanian terdiri atas 3 (tiga) dimensi, yaitu : Infrastruktur irigasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pasar,

infrastruktur pendukung lainnya. Setiap dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan Penjelasan variabel infrastruktur (X_2)



Nilai Rata - rata = 3,6731 Standar Deviasi = 0,31565

Gambar 6. Analisis deskriptif untuk infrastruktur

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 9,97 persen, setuju sebanyak 51,24 persen, cukup setuju sebanyak 36,56 persen, tidak setuju sebanyak 0,57 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 1,64 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,6731 dan

standar deviasi sebesar 0,315655 dengan demikian X_2 dalam kriteria penilaian baik

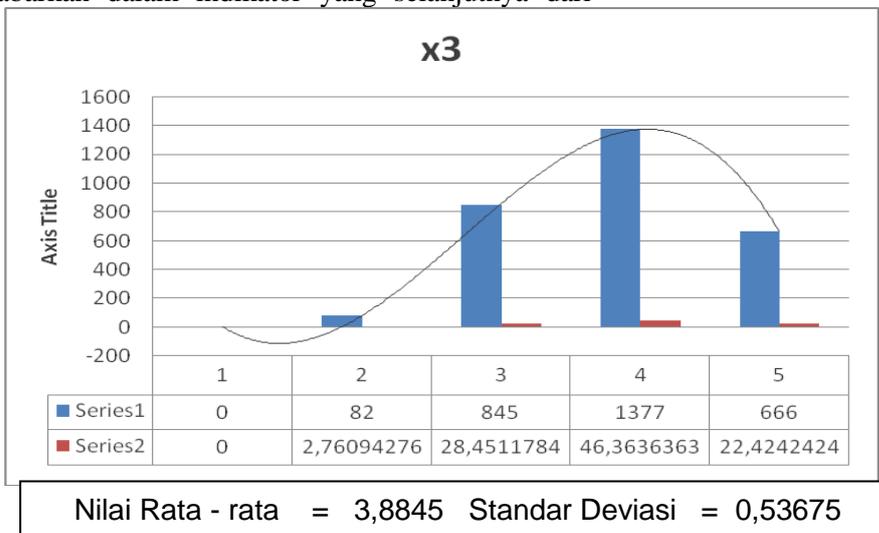
c). Teknologi dan Sumber daya manusia, (X_3)

Variabel teknologi dan SDM terdiri atas 2 (dua) dimensi yaitu Penguasaan teknologi, kemudahan penguasaan dan aksesibilitas terhadap teknologi. Kualitas SDM (petani) dan dukungan

kualitas petugas pertanian yang memberikan pelatihan terhadap penguasaan teknologi.

Setiap sub variabel tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari

indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan. Penjelasan teknologi dan Sumber daya manusia (X_3) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

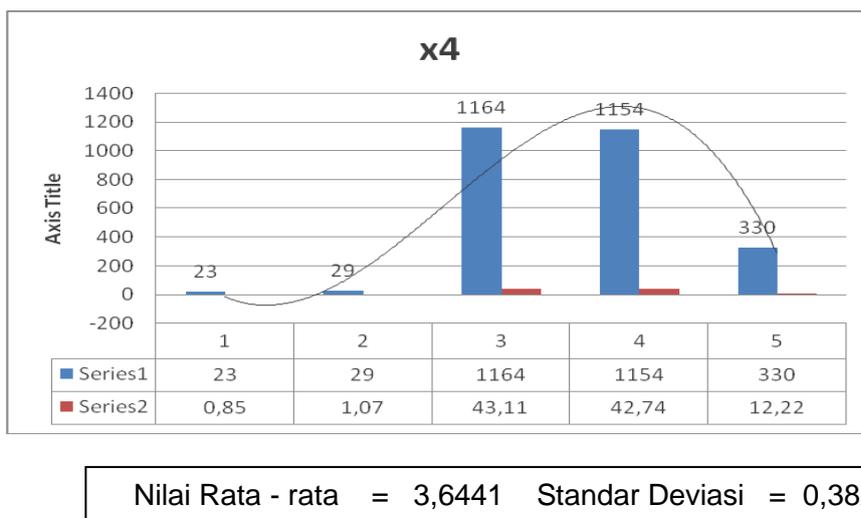


Gambar 7. Analisis deskriptif untuk Teknologi dan SDM

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,42 persen, setuju sebanyak 46,36 persen, cukup setuju sebanyak 28,45 persen, tidak setuju sebanyak 2,76 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,8845 dan standar deviasi sebesar 0,53675, dengan demikian X_3 dalam kriteria penilaian baik

d). Energi, (X_4)

Variabel energi terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu Ketersediaan dan kecukupan energi, kemurahan energi, dan keaneka ragaman energi. Setiap Dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan. Penjelasan variabel energi yang berkaitan dengan aktivitas pertanian (X_4) dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 8. Analisis deskriptif untuk energi

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 12,22 persen, setuju sebanyak 42,74 persen, cukup setuju sebanyak 43,11 persen, tidak setuju

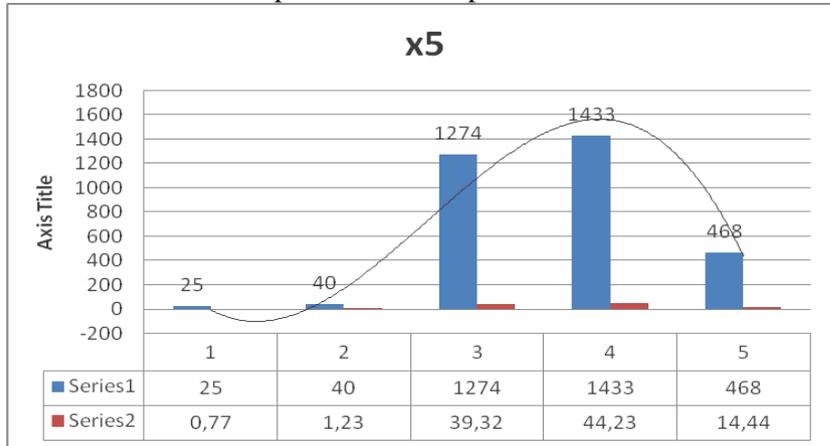
sebanyak 1,07 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,85 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,6441 dan

standar deviasi sebesar 0,38284, dengan demikian X_4 dalam kriteria penilaian baik.

tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan. Penjelasan variabel sarana produksi pertanian (X_5) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

e). Sarana produksi pertanian, (X_5)

Variabel sarana produksi terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu bibit pertanian, obat-obatan pertanian, dan alat-alat pertanian. Setiap dimensi



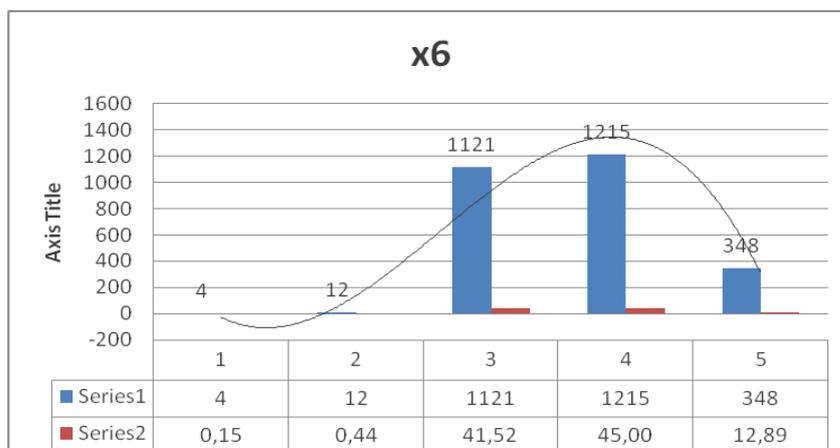
Nilai Rata - rata = 3,7034 Standar Deviasi = 0,43043

Gambar 9. Analisis deskriptif untuk sarana produksi pertanian

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 14,44 persen, setuju sebanyak 44,23 persen, cukup setuju sebanyak 39,32 persen, tidak setuju sebanyak 1,21 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,77 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,7034 dan standar deviasi sebesar 0,43043, dengan demikian X_5 dalam kriteria penilaian baik

Variabel modal untuk pertanian terdiri atas 3 (dua) dimensi yaitu kepemilikan modal yang dimiliki oleh petani, Kemudahan perolehan tambahan modal (kredit) dan Tambahan modal yang bersipat tidak mengikat atau bantuan gratis. Setiap dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam butir item pertanyaan. Penjelasan variabel modal pertanian (X_6) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

f). Modal, (X_6)



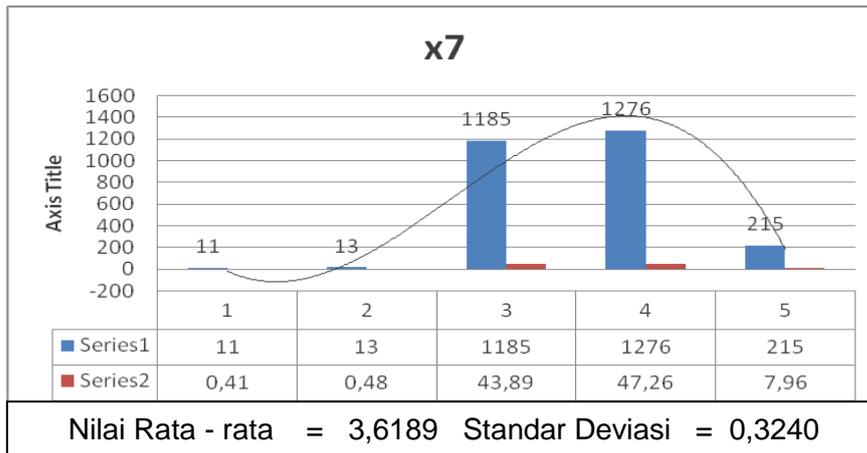
Nilai Rata - rata = 3.6189 Standar Deviasi = 0,32340

Gambar 10. Analisis deskriptif untuk modal

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 12,89 persen, setuju sebanyak 45,00 persen, cukup setuju sebanyak 41,52 persen, tidak setuju sebanyak 0,44 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,15 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,6189 dan standar deviasi sebesar 0,32340, dengan demikian X_6 dalam kriteria penilaian baik

g). Kelembagaan dan Kebijakan

Variabel kelembagaan dan kebijakan yang mendukung pertanian terdiri atas 3 (tiga) dimensi yaitu Keberadaan, ketersediaan, kelembagaan, Peranan kelembagaan, Keberadaan dan efektivitas Kebijakan. Setiap dimensi variabel tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam butir item pertanyaan. Penjelasan variabel kelembagaan dan Kebijakan (X_6) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

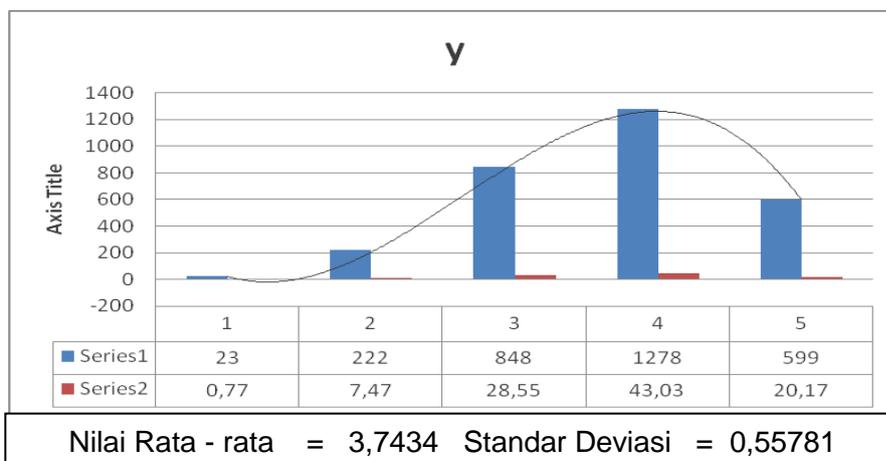


Gambar 11. Analisis deskriptif untuk Kelembagaan dan Kebijakan

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 7,96 persen, setuju sebanyak 47,26 persen, cukup setuju sebanyak 43,89 persen, tidak setuju sebanyak 0,48 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,41 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,6189 dan standar deviasi sebesar 0,3240, dengan demikian X_6 dalam kriteria penilaian baik

h). Pembangunan Sektor Pertanian, (Y)

Variabel pembangunan sektor pertanian terdiri atas 2 (dua) dimensi yaitu Program pengembangan agribisnis, dan program peningkatan ketahanan pangan. . Setiap dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa item pertanyaan . Penjelasan variabel Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung (Y) dapat dijelaskan pada tabel berikut:

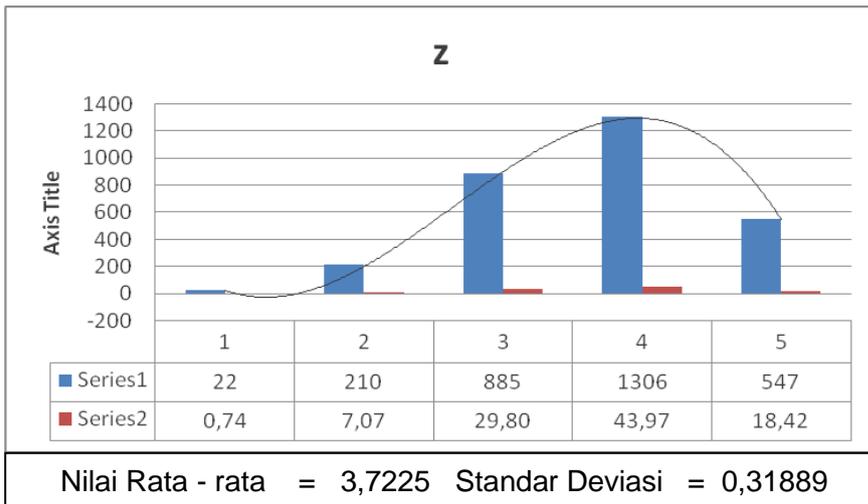


Gambar 12. Analisis deskriptif pembangunan sektor pertanian

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 20,17 persen, setuju sebanyak 43,03 persen, cukup setuju sebanyak 28,55 persen, tidak setuju sebanyak 7,47 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,77 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,7434 dan standar deviasi sebesar 0,55781, dengan demikian Y dalam kriteria penilaian baik

Kesejahteraan Ekonomi Petani (Z)

Variabel kesejahteraan petani terdiri atas 2 (dua) dimensi yaitu kesehatan dan pendidikan petani, dan pendapatan, pemerataan, pendapatan , dan distribusi pengeluaran. Setiap dimensi tersebut kemudian dijabarkan dalam indikator yang selanjutnya dari indikator tersebut dijabarkan lagi dalam beberapa butir item pertanyaan Penjelasan variabel kesejahteraan petani (Z) dapat dijelaskan pada tabel berikut:



Gambar 13. Analisis deskriptif kesejahteraan ekonomi petani

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa, dari 270 responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 18,42 persen, setuju sebanyak 43,97 persen, cukup setuju sebanyak 29,80 persen, tidak setuju sebanyak 7,07 persen, sedangkan yang menjawab sangat tidak setuju 0,74 persen, dengan perolehan angka rata-rata penafsiran sebesar 3,7225 dan standar deviasi sebesar 0,31889, dengan demikian Z dalam kriteria penilaian baik

2). Analisis Induktif dari Data Hasil Kuesioner

1. Hubungan antar Variabel Bebas Penelitian : Lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, kelembagaan dan kebijakan

Terdapat dugaan yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas

dalam penelitian. Hubungan diantara keempat tersebut dapat digambarkan pada Gambar 4.13 sebagai berikut:

Gambar 4.13. Hubungan antara variabel lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, kelembagaan dan kebijakan

Kriteria keeratan hubungan antar variabel mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Sevilla et.al. (1997, h. 280), yang menyatakan bahwa “*high or low correlation, depends generally on the nature of variables being studied. You may, how ever the following categorization which most specialists in statistics usually agree with*”. Secara rinci keeratan kriteria korelasi adalah sebagai berikut :

Tabel 37. Keeratan Hubungan diantara Variabel X (Korelasi)

Correlation (r)	Indication
Between ± .80 to 1.00	High correlation (Sangat tinggi)
Between ± .60 to .79	Moderately high Correlation (Tinggi)
Between ± .40 to .59	Moderately correlation (Sedang)
Between ± .20 to .39	Low correlation (Rendah)
Between ± .01 to .19	Negligible correlation (Sangat rendah)

Sumber : Sudjana, 2003

3. Analisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

1. Pengaruh Bersamaan dan Parsial Variabel lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kelembagaan dan kebijakan secara simultan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung

Variabel lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM,

energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kelembagaan dan kebijakan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, adalah sebagai berikut :

1). Besaran Pengaruh Langsung :

1. Variabel lahan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (X_1), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel

pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 10,70 persen ($R^2 yx_1$).

2. Variabel , infrastruktur (X_2), mempunyai pengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian Provinsi Lampung (Y) sebesar 4,60 persen ($R^2 yx_2$).
3. Variabel , teknologi dan SDM (X_3), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 12,3 persen ($R^2 yx_3$),
4. Variabel energy (X_4), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 2,20 persen ($R^2 yx_4$).
5. Variabel sarana produksi pertanian, (X_5), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 8,20 persen ($R^2 yx_5$).
6. Variabel modal, (X_6), mempunyai pengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian Provinsi Lampung (Y) sebesar 7,60 persen ($R^2 yx_6$).
7. Variabel kelembagaan dan kebijakan (X_7), mempunyai pengaruh langsung terhadap variabel pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 2,30 persen ($R^2 yx_7$),

2). Besaran Pengaruh Tidak langsung

1. Besaran pengaruh tidak langsung variabel lahan (X_1) melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung, sebesar 4,90 persen ($R^2 yx_1$).
2. Besaran pengaruh tidak langsung variabel infrastruktur (X_2), melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung, sebesar 2,20 persen ($R^2 yx_2$).
3. Besaran pengaruh tidak langsung variabel teknologi dan SDM (X_3) , melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pembangunan sektor pertanian Provinsi Lampung, sebesar 4,80 persen ($R^2 yx_3$).
4. Besaran pengaruh tidak langsung variabel energi, (X_4) melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, sebesar 2,80 persen ($R^2 yx_4$).
5. Besaran pengaruh tidak langsung variabel sarana produksi pertanian (X_5) melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung, sebesar 3,70 persen ($R^2 yx_5$).
6. Besaran pengaruh tidak langsung variabel modal (X_6) melalui Keenam variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di

Provinsi Lampung, sebesar 7,40 persen ($R^2 yx_6$).

7. Besaran pengaruh tidak langsung variabel kelembagaan dan kebijakan (X_7) melalui keenam variabel bebas lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Lampung, sebesar 1,30 persen ($R^2 yx_7$).

Adapun besaran pengaruh total pengaruh (koefisien determinasi) dari variabel lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kelembagaan dan kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung dapat dinyatakan oleh besaran koefisien determinasi yang besarnya adalah sebesar 75,20 persen, sedangkan pengaruh variabel lain di luar model adalah sebesar 24,80 persen.. Untuk dapat menjelaskan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel X terhadap variabel Y. dapat di jelaskan dalam tabel 4.22. di bawah ini :

Tabel 38. Pengaruh langsung dan tidak langsung Variabel X terhadap Y

Variabel	Pengaruh Langsung X thd Y	Pengaruh Tidak Langsung X terhadap Y							Total Pengaruh Tdk langsung	Sub. Total Pengaruh
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7		
X1	0.107		0.0018	0.0113	0.0073	0.0064	0.0214	0.0010	0.049	0.156
X2	0.046	0.0018		0.0009	0.0045	0.0037	0.0092	0.0016	0.022	0.068
X3	0.123	0.0113	0.0009		0.0082	0.0029	0.0250	0.0002	0.048	0.172
X4	0.022	0.0073	0.0045	0.0082		0.0032	0.0033	0.0016	0.028	0.051
X5	0.082	0.0064	0.0037	0.0029	0.0032		0.0131	0.0078	0.037	0.120
X6	0.076	0.0214	0.0092	0.0250	0.0033	0.0131		0.0019	0.074	0.150
X7	0.023	0.0010	0.0002	0.0002	0.0016	0.0078	0.0019		0.013	0.036
TOTAL PENGARUH X TERHADAP Y										0.752

Sumber : Data diolah,

3). Pengaruh parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan tabel 4.15. di atas, dapat menjelaskan bahwa besaran pengaruh dari masing-masing variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6,$ dan X_7 sebagai berikut :

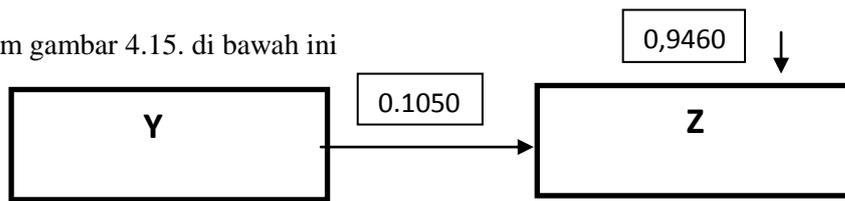
1. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel lahan (X_1) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 15,60 persen ($R^2 yx_1$).
2. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel infrastruktur, (X_2) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 6,80 persen ($R^2 yx_2$).
3. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel teknologi dan SDM (X_3) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung (Y) sebesar 17,20 persen ($R^2 yx_3$).
4. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel energy (X_4) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 5,10 persen ($R^2 yx_4$).

5. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel sarana produksi Pertanian (X_5) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 12,00 persen ($R^2 yx_5$).
6. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel modal (X_6) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 15,00 persen ($R^2 yx_6$).
7. Total pengaruh secara masing-masing dari variabel kelembagaan dan kebijakan (X_7) terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung (Y) sebesar 3,60 % ($R^2 yx_7$).

3.2. Pengaruh pembangunan sektor pertanian (Y) terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung (Z).

Analisis jalur variabel pertumbuhan ekonomi (Y), terhadap variabel kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung (Z).dapat dilukiskan

dalam gambar 4.15. di bawah ini



Gambar 14. Pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat kita jelaskan besaran derajat asosiatif atau koefisien jalur dari variabel pengaruh pembangunan sektor pertanian (Y) terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung (Z) besaran koefisien jalurnya sebesar 0,9460.

Adapun persamaan jalur, sebagai berikut :

$$Z = 0,9460 Y + \varepsilon_2$$

Dimana :

Z = Kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung

Y = Pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung

ε_2 = Pengaruh variabel lain diluar model

Adapun besaran pengaruh pembangunan sektor pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung sebesar 89,50 persen, sedangkan pengaruh variabel lain diluar model (ε_2) sebesar 10,50 persen

3.3. Model Analisis Gabungan Pengaruh Variabel lahan,infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, kelembagaan dan kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian serta implikasi kepada kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung

Berdasarkan perhitungan analisis jalur, maka hasil keseluruhan dari analisis tersebut dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini :

C. Pembahasan dari Hasil Perhitungan Analisis Jalur dikaitkan dengan teoritikal dan Fenomena.

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, baik secara deskriptif, maupun analisis verifikatif dari faktor - faktor yang mempengaruhi pembangunan sektor pertanian dan implikasinya pada kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung, maka peneliti perlu melakukan pembahasan secara mendalam tentang kondisi dan

fenomena yang berkaitan dengan aspek perencanaan, pengelolaan, pengembangan sektor pertanian, khususnya petani padi di Provinsi Lampung yang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pertanian padi merupakan sektor usaha yang banyak menyerap lapangan pekerjaan, terutama lapangan pekerjaan di pedesaan. Disamping itu para petani yang ada di Lampung sebagian besar tingkat kesejahteraan ekonominya sangat terbatas. Atas pertimbangan tersebut di atas maka peneliti perlu melakukan pembahasan secara mendalam, guna memperoleh informasi yang lengkap tentang pokok bahasan yang di teliti. Disamping itu dalam pembahasan ini akan menjelaskan secara menyeluruh dan komprehensif mengenai keratan hubungan di antara variabel bebas, besaran koefisien jalur dari variabel bebas terhadap variabel terikat, dan besaran pengaruh secara langsung maupun tidak langsung dari masing variabel, serta melakukan pengujian model penelitian. Selengkapnya pembahasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembahasan Analisis Deskriptif

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya pertanian padi, dan penganalisaan secara mendalam terhadap jawaban dari responden, serta keterkaitannya dengan teori - teori yang mendukung dan fenomena - fenomena yang terjadi di lapangan, maka perlu adanya pembahasan analisis deskriptif tentang situasi dan kondisi serta pelaksanaan masing-masing variabel, sebagai berikut :

A. Situasi dan Kondisi lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, dan kelembagaan dan kebijakan secara simultan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung

1). Lahan

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar 97,71 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,6664 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,44464. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik. Artinya bahwa lahan merupakan faktor penting dan memiliki pengaruh terhadap pembangunan sektor ekonomi.

2). **Infrastruktur**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar 97,77 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,7683 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,43027. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

3). **Teknologi dan SDM**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar sebesar 97,23 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,5588 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,54390. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

4). **Energi**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar 98,07 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,6696 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,44396. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

5). **Sarana produksi pertanian**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar sebesar 97,99 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,5108 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,60648. Hal menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

6). **Modal**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah

frekuensinya sebesar sebesar 99,41 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,6848 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,49479. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

7). **Kelembagaan dan kebijakan**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar 99,11 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,6643 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,56350. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

8). **Pembangunan sektor pertanian**

Pada dasarnya jawaban responden terhadap seluruh item pertanyaan dalam kuesioner, sebagian besar menjawab dengan skor di antara skor 3 sampai dengan skor 5, dengan jumlah frekuensinya sebesar 91,75 persen. Sedangkan nilai rata sebesar 3,7568 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,57816. Hal ini menandakan bahwa responden menjawab dengan kriteria sedang sampai dengan kriteria baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis berdasarkan observasi, wawancara, dan pengolahan data kuesioner dari 270 responden, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan, dari variabel bebas : lahan, infrastruktur, teknologi dan SDM, energi, sarana produksi pertanian, modal, kelembagaan dan kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung . dengan besaran pengaruhnya sebesar 75,20 persen
2. Terdapat pengaruh secara parsial yang signifikan dari masing -masing variabel dengan besaran pengaruhnya sebagai berikut :
 - 2.1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas lahan, terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung . dengan besaran pengaruhnya sebesar 15,6 persen
 - 2.2. Terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas infrastruktur, terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung . dengan besaran pengaruhnya sebesar 6,80 persen
 - 2.3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas teknologi dan SDM, terhadap pembangunan sektor pertanian di Provinsi Lampung . dengan besaran pengaruhnya sebesar 17,20 persen

3. Terdapat pengaruh yang signifikan, dari variabel pembangunan sektor pertanian terhadap kesejahteraan ekonomi petani di Provinsi Lampung . dengan besaran pengaruhnya sebesar 89,50 persen

Saran - saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran bagi Pihak pemerintah daerah, Dinas pertanian, dinas-dinas terkait dengan pembangunan sektor pertanian, para petani, dan pihak-pihak lainnya yang terkait, sebagai berikut:

1. Perlu adanya peninjauan kembali berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah pusat dan pihak pemerintah daerah, selanjutnya dibuatkan kebijakan dan regulasi yang lebih lengkap dan lebih operasional sehingga mampu lebih meningkatkan dorongan terhadap optimalisasi pembangunan sektor pertanian.
2. Adanya peningkatan koordinasi di antara kelembagaan di daerah yang berkaitan dengan pembangunan sektor pertanian, sehingga mampu lebih meningkatkan sinergisitas di antara kelembagaan yang terkait.
3. Peningkatan status yang dimiliki oleh petani, sehingga petani mempunyai sertifikat lahan,
4. Adanya peningkatan infrastruktur pertanian baik dari aspek kuantitas infrastruktur maupun dari kualitas infrastruktur.
5. Peningkatan kemampuan dari petani melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien dan lebih efektif.
6. Pihak Kementerian Pertanian Pusat, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kota/Kabupaten perlu lebih meningkatkan lagi kerjasama dan koordinasi yang lebih intensif , guna menetapkan strategi dan kebijakan bersama yang mendorong percepatan pembangunan sektor pertanian.
7. Bagi pihak petugas lapangan atau penyuluh lapangan , secara terus menerus perlu meningkatkan teknik dan ketrampilan dalam memberikan penjelasan dan pengarahan kepada petani secara lebih efisien , efektif dan produktif.
8. Dalam upaya penambahan modal usaha perlu dilakukan bantuan kredit yang murah bunganya, mudah prosesnya dan cepat perolehannya
9. Setiap upaya peningkatan hasil produksi petani harus di berikan jaminan terhadap harga beras yang dihasilkan, sehingga tidak jadi korban

para tengkulak.

10. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani Pemerintah daerah harus membantu memberikan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sarana lingkungan yang bersih dan sehat bagi keluarga petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, 2002, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Ekonisia, Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta.
- Husni Malian, A., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Produk Pertanian dan Produk Industri Pertanian Indonesia : Pendekatan Macroeconometric Models dengan Path Analysis*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Jurnal Agro Ekonomi Volume 21 No. 2 Oktober 2003 : 97 – 121
- Badan Pusat Statistik, (2005), *Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka*, BPS : Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, (2009), *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*, BPS : Jakarta.
- _____, (2009). *Laporan Perekonomian Indonesia 2008*. BPS : Jakarta.
- _____, (2010). *Laporan Perekonomian Indonesia 2009*. BPS : Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2010, Luas Lahan Provinsi Lampung menurut Penggunaan dan Kabupaten/Kota Lampung. www.bps.lampung.go.id.
- Boediono, (1999), *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Edisi Pertama, BPFE : Yogyakarta.
- Chenery H and Srinivasan, T.N., 1988, *Handbook of Development Economics*, Elsevier Science Publishers, North-Holland.
- Dumairy, (1996), *Perekonomian Indonesia*, Cetakan Kelima, Erlangga : Jakarta.
- Hanafie, R., (2010), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Jhingan, M.L., (2000), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Penerjemah : D. Guritno, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad, 1996, Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Agroindustri Indonesia: Suatu Catatan Empiris, Jurnal Kelola
- , (2004), *Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Kedua, UPP AMP YKPN : Yogyakarta.
- , (2003), *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Erlangga, Yogyakarta
- Lewis, W. Arthur, “The Slowing Down of the Engine of Growth”, *American Economic Review* No. 80. September 1980

- Lincoln, Arsyad, (1999), *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Kesatu. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta.
- Mubyarto, (1995), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Cetakan Keempat, LP3ES : Jakarta.
- Porter, Michael, (1990), *The Competitive Advantage of Nations*, The Free Press, A Division of Simon & Schuster Inc., New York.
- Priadana, M.S. dan Muis, S., (2009), *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Pudjanarsa, A. dan Nursuhud, D., (2006), *Mesin Konversi Energi*, Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Saragih, B, (2010), *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Penerbit IPB Press : Bogor.
- Sekaran, Uma, (2006), *Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis*, Buku 2, Edisi 4, Penerjemah : Kwan Men Yon, Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- Singarimbun M. dan Effendi S., (1995), *Metode Penelitian Survai*, PT. Pustaka LP3ES : Jakarta.
- Sugiyono, (2005), *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedelapan, CV. Alfabeta : Bandung.
- _____, (2009). *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan Ketiga Belas, Alfabeta : Bandung.
- Sukirno, Sadono, (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group : Jakarta.
- Sudjana, 1991,2003 *Teknik Analisis Regresi dan Korelasi*, Edisi Pertama, dan edisi revisi Bandung: Tarsito.
- Suryana, (2000). *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Ed. Pertama. Salemba Empat : Jakarta.
- Tambunan, (2009), *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Todaro, M., (2000), *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*, Terjemahan : Haris Munandar. Jilid 1. Edisi ke-6. Erlangga : Jakarta.
- Wirasasmita, Yuyun. (2007). *Uji Kelayakan Model; Extended Handout Metode Penelitian Enonomi dan Bisnis*, Bandung: UNPAD
- Yakin, Addinul, (2004), *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Teori dan Kebijakanaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, Cetakan Pertama, Akademika Pressindo : Jakarta.
- Kompas 9 April 2007
- Sevilla et.al. (1997